

KK
TH 29/01
Sul
P

PERGESERAN ASAS PEWARISAN DALAM HUKUM ADAT

TESIS

**untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



Oleh :

RACHMI SULISTYARINI

NIM : 099913254/M

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

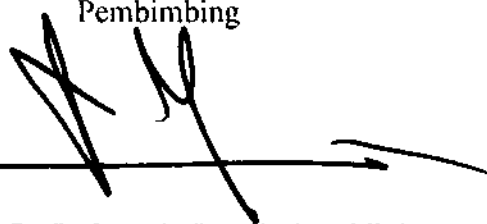
Tanggal 5 Juni 2001

Lembar pengesahan

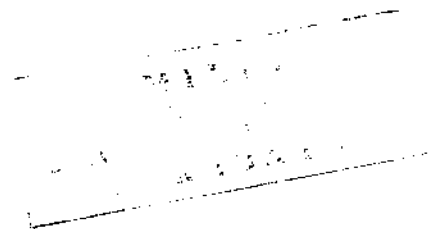
TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 APRIL 2001

Oleh

Pembimbing



Prof Mr Dr R. Soetojo Prawirohamidjojo
NIP. 130 445 320.



Telah diuji pada

Tanggal 5 Juni 2001

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, SH.MS.

Anggota : 1. Prof Mr Dr R. Soetojo Prawirohamidjojo

2. Dr. Abdoel Rasjid, SH.LLM.

3. Dr. M.L. Souhoka, SH.MS.

4. Hj. Sri Hayati, SH.MS.

5. Sri Handayani, SH.MS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof.Dr.H. Soedarto, DTMH,Ph.D. yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister di Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moch. Amin dr., dan Staf, dan mantan Direktur Program Pascasarjana, Prof. Dr. Soedjiono, dr., serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Abdoel Rasjid, SH.LLM. atas kesempatan dan bantuan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan program magister di Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
3. Kepada Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Eka Afnan Troena, SE., dan Pembantu Rektor II Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Moch. Munir, SH., saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan, fasilitas dan bantuan finansial sehingga meringankan beban saya selama studi dan menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Kepada Prof Mr Dr R. Soetojo Prawirohamidjojo, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaannya sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya dalam penulisan tesis ini;

5. Kepada Ibu Hj. Sri Hayati, SH.MS. yang telah bersedia memberikan pengarahan, perhatian dengan tulus ikhlas dan sabar kepada saya dari awal hingga akhir penulisan tesis ini;
6. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Masruchin Ruba'i, SH.MS. atas kesempatan yang diberikan dan fasilitas demi kelancaran studi ini.
7. Kepada Tim Penguji tesis, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan disertai rasa hormat yang setulus-tulusnya atas saran-saran dan kesediaannya memberikan bimbingan demi lebih sempurnanya penulisan ini;
8. Kepada Sdr. Drs. Ferry Subagio dan Sdr. Edy Roesanto, SH. yang dengan tulus ikhlas dan telaten telah memberikan bantuannya;
9. Kepada Suami, anak-anak, saudara-saudara dan semua pihak yang telah banyak memberikan perhatian, bantuan materiil dan moril, saya mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang telah diberikan tidak sia-sia;

Saya percaya atas ketulusan beliau-beliau tersebut dan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, semoga Allah S.W.T. membalas jasa baik dan selalu meridhoi kita.

Akhirnya teriring harapan semoga karya ini bermanfaat.

Surabaya,

Penulis

RINGKASAN

Sampai saat ini, hukum waris yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistis. Tiada unifikasi di bidang hukum ini karena dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar "*bidang-bidang yang bersifat netral*".

Hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat sesuai dengan jiwanya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang. Adapun kesanggupannya untuk menyesuaikan diri itu oleh karena bentuk hukum adat itu sendiri tidak tertulis, tidak dikodifikasi, maka dengan sifat elastisitasnya yang luas sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru.

Penelitian normatif yang menganalisis putusan hakim tentang warisan ini, dalam perkembangannya juga telah mengalami pergeseran dari rumusan baku proses penerusan menurut hukum adat. Hukum waris menurut sistem hukum adat adalah proses penerusan dan pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Sebagai suatu proses penerusan, warisan akan jatuh kepada keturunan. Oleh karena itu, menurut dasar pemikiran dan pandangannya apabila ada keturunan atau anak-anak, maka perselisihan tidak akan terjadi, harta yang disediakan orang tua sebagai dasar materiil kehidupan anak. Namun, fakta yang terjadi perselisihan atau persengketaan waris muncul dari anak-anak atau keturunan tersebut. Hal ini tidak sesuai lagi dengan asas yang dianut dalam hukum waris adat, yaitu asas kerukunan dan asas musyawarah.

Menyangkut tentang benda, ternyata hanya barang-barang yang berwujud benda yang menjadi obyek persengketaan, dalam hal ini adalah tanah dan rumah. Benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yang menjadi obyek persengketaan. Rupanya pepatah Jawa "*sedumuk bathuk sanyari bumi*" betul-betul menjadi kebenaran, sehingga sanggup meretakkan kerukunan dan keutuhan keluarga.

Di dalam pewarisan yang berlaku di dalam masyarakat yang menganut garis keibuan (*matrilineal*), menurut perkembangannya juga telah terjadi kekaburan batas-batas antara harta pusaka tinggi dan pusaka rendah. Kaidah-kaidah yang mengatur tentang kedudukan harta pusaka yang tidak untuk dimiliki semakin melemah. Di samping itu dalam hal penentuan mamak kepala waris sudah berkembang menurut perkembangan jaman, bahwa semula dasar penetapannya adalah laki-laki tertua dalam satu kaum, dan kini yang menjadi tolok ukur adalah kemampuan dan kecakapan serta kecerdasan dan tidak harus saudara laki-laki dalam kaum. Pencerminan unsur keadilan dalam putusan hakim menggunakan dasar kelayakan seperti halnya yang dianut dalam prinsip hukum waris adat dan tidak berdasarkan perhitungan matematik.

Simpulan yang dapat ditarik berdasarkan permasalahan adalah penyelesaian sengketa warisan menurut prinsip hukum adat berdasarkan musyawarah bergeser ke arah penyelesaian melalui sidang pengadilan (*yudicial*). Di samping itu tampak bahwa dari sistem pewarisan yang berlaku pada prinsipnya akan mengarah pada sistem bilateral.

ABSTRACT

The general aim of this research is to analyze judge's decision concerning heritage principles shifted on adat law. The particular aim of this research is to analyze the elasticity and dynamic of adat law applying in inheriting principle related to adat law.

The methods have been used in this research is using conceptual approach.

There are two kinds of legal resources which are used as references. Firstly, primary legal resources that is judge's decisions. Secondly, secondary legal resources namely, literature, expert opinions, research reports and scientific works. After that all resources have been analyzed and interpreted by using content analysis.

The result of this research shows that there is a shift in inheriting principle. The inheritance problems have made concord and family principles faded. Meanwhile, deliberation principle can not be preserved any longer since, there is a shift in dispute inheritance object.

The conclusion of this research is, there is a changing in values which are living in society have affected the way of thinking of adat society. Consequently, the strength of structure can not be based on culture any more.

Key words : heritage principles shifted and adat law system.

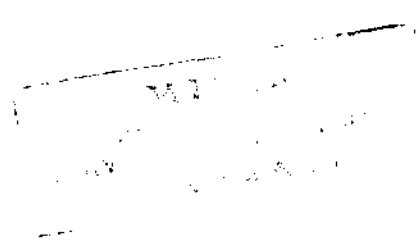
DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan.....	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar.....	iii
Persetujuan.....	iv
Penetapan Panitia Penguji.....	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Ringkasan	viii
Abstract.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	6
5. Kajian Pustaka	6
6. Metode Penelitian	16
6.1. Pendekatan	16
6.2. Bahan hukum yang digunakan sebagai acuan analisis.....	16
6.3. Langkah penulisan.....	16
6.4. Analisis Bahan Hukum	17
7. Sistematika Penulisan	17
BAB II : PERGESERAN ASAS PEWARISAN DALAM HUKUM ADAT	18
1. Gambaran Umum Hukum Waris Adat	18
a. Terminologi hukum waris	20
b. Asas dan sifat hukum waris adat	26
c. Unsur-unsur pewarisan.....	29

d. Sistem pewarisan	37
e. Proses pewarisan	44
2. Penerapan Asas Pewarisan Dalam Putusan Hakim	54
2.1. Kedudukan anak.....	55
2.2. Anak angkat.....	60
2.3. Kedudukan janda.....	76
2.4. Kedudukan mamak kepala waris.....	89
2.5. Hibah terhadap harta asal	97
3. Pergeseran Asas Pewarisan.....	101
BAB III : PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN	107
1. Kompetensi Mengadili Perkara Waris.....	107
2. Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim	110
BAB IV : PENUTUP	121
1. Simpulan.....	121
2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123

BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai ragam suku bangsa dengan berbagai macam agama dan kepercayaan yang diyakininya. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia mempunyai sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan yang demikian tersebut, tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Dengan demikian usaha ke arah unifikasi hukum waris masih belum dapat terwujud. Hal ini disebabkan bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar "bidang-bidang yang bersifat netral"¹

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja memberikan tolok ukur hal tersebut termasuk ke dalam "bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi".² Sebagai akibat dari keadaan seperti ini, maka hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga kini masih bergantung pada hukum waris yang berlaku bagi yang meninggal dunia.³

Dalam hukum waris yang berlaku hingga saat ini meliputi 3 sub sistem hukum, yakni hukum waris barat (B.W), sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Islam. Ketiga sistem hukum tersebut diterapkan pada tiap-tiap golongan, yaitu

¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991, h. 6.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 7.

golongan Eropa, golongan Bumi Putera dan golongan Timur Asing seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 163 I.S. juncto pasal 131 I.S. hukum waris adat berlaku bagi golongan Bumi Putera. Hukum waris adat bersifat pluralistik berdasarkan sistem keturunan.

Hukum adat adalah hukum yang hidup, dikatakan sebagai hukum yang hidup (*the living law*), karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat sesuai dengan jiwanya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang.⁴

Perubahan-perubahan pola yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan berubahnya aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat itu, seperti pengaruh kejadian-kejadian dan perikeadilan hidup silih berganti. Adapun kesanggupannya untuk menyesuaikan diri oleh karena bentuk hukum adat itu sendiri tidak tertulis, tidak terkodifikasi, maka dengan sifat elastisitasnya yang luas sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru.⁵

Dari sifatnya yang pluralistik, terdapat beberapa perbedaan sifat yang mendasar antara ketiga sistem hukum waris tersebut, yaitu dalam hal unsur matinya pewaris, jenis harta warisan dan juga mekanisme pewarisannya. Pewarisan menurut hukum adat pada hakekatnya berkaitan dengan keturunan, oleh karena harta milik orang tua adalah sebagai dasar materiil kehidupan anak di samping pewarisan sebagai proses penerusan.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992. h. 21.

⁵ Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi*, Ubhara Press, 1996.

Supomo mengemukakan bahwa tujuan perkawinan menurut paham tradisional masyarakat Indonesia adalah meneruskan angkatan atau generasi. Sehubungan dengan itu harus ada harta orang tua yang akan disediakan sebagai syarat kebendaan untuk menyelenggarakan proses penerusan dan pengoperan. Apabila suami istri mendapat keturunan, maka tujuan perkawinan telah tercapai. Dengan adanya keturunan diharapkan akan menjadi naungan di hari tua, juga diharapkan dapat "*mikul dhuwur mendem jero*" (Jawa) artinya anak dapat mengangkat nama baik orang tuanya.

Prinsip yang tercermin dalam masyarakat adat adalah supaya kerukunan, keutuhan keluarga dapat tetap terjaga, sehingga tidak terjadi perpecahan dan keretakan dalam keluarga. Menurut asas kerukunan ini lebih lanjut Supomo menyatakan bahwa sesungguhnya dalam pewarisan menurut hukum adat, tidak akan terjadi perselisihan jika ada keturunan.⁶ Perselisihan akan muncul jika tidak ada keturunan. Asas-asas dalam pewarisan menurut sistem hukum waris adat seperti kerukunan, kebersamaan, musyawarah, keadilan juga tercermin dalam mekanismenya, yaitu mengenai cara pembagian warisan dalam hukum adat tidak mengenal perhitungan matematis, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan fungsi dan manfaat dari wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan.

Akan tetapi walaupun di dalam hukum adat mengenal asas persamaan dan kebersamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian harta warisan dalam jumlah yang sama. Hal tersebut bukanlah menjadi persoalan asalkan pelaksanaannya dijalankan secara musyawarah. Apabila ada perkara yang perlu

⁶ Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 82.

diselesaikan, maka dasar pertimbangan yang penting adalah apa yang dirasakan adil sesuai dengan kesadaran masyarakat pada saat perkara itu diadili.

Berkaitan dengan itu, maka yang harus diketahui adalah sistem pewarisannya.

Hukum Adat di Indonesia membagi ke dalam 3 macam sistem pewarisan yaitu :

- a. sistem pewarisan individual, cirinya bahwa harta peninggalan si pewaris dapat dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris;
- b. sistem pewarisan kolektif, cirinya bahwa harta peninggalan si pewaris diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut disebut harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka; dan
- c. sistem pewarisan mayorat, di mana anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga.⁷

Mencermati hal tersebut (huruf c), maka ada dua sistem mayorat, yaitu mayorat pria seperti di Bali dan mayorat wanita di Tanah Semendo di Sumatera Selatan. Namun demikian berbagai sistem pewarisan yang ada di Indonesia tersebut menurut Hazairin tidak perlu langsung menunjuk kepada masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku.⁸ Adapun alasannya adalah bahwa sistem pewarisan individual bukan saja ditemui dalam masyarakat bilateral, akan tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal, seperti di Tanah Batak. Demikian pula sistem mayorat (hak anak wanita yang tertua) selain dalam masyarakat *patrilineal* di Tanah Semendo Sumatera Selatan, dijumpai pula dalam masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat. Sedangkan sistem kolektif tersebut dalam batas-batas tertentu dijumpai pula di

⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1988, h. 165.

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Tinta Mas, Jakarta, 1979, h. 13.

Minahasa dalam masyarakat yang *bilateral* dan juga di pulau Ambon dalam masyarakat *patrilineal*.

Di dalam sistem pewarisan individual atau dengan istilah lain sistem pewarisan perseorangan ini setiap waris mendapatkan bagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Akibat dari sistem individual ini, menyebabkan kemungkinan akan timbulnya sengketa atau perselisihan di antara ahli waris semakin besar. Pada dasarnya penyelesaian sengketa harta warisan yang diharapkan, adalah apabila perselisihan itu berhasil diselesaikan dengan damai, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan keluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun seperti sediakala. Akan tetapi karena faktor kepentingan pribadi dan kebendaan, ada kalangan memaksa para pihak yang bersengketa mengorbankan sifat kebersamaan antar mereka, sehingga hal ini turut memberi andil untuk memilih penyelesaian melalui pengadilan.

Berdasarkan uraian itulah, maka ingin dianalisis secara mendalam tentang pergeseran asas pewarisan dalam sistem hukum adat dalam penulisan ini.

2. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas sehubungan dengan pergeseran asas pewarisan dalam hukum adat, yaitu :

- a. Apakah asas pewarisan dalam hukum adat telah mengalami pergeseran;
- b. Bagaimanakah penerapan asas keadilan tercermin dalam putusan hakim ?

3. Tujuan Penelitian

Didasarkan atas permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis sifat elastis dan dinamis dari hukum adat dalam proses pewarisan. Di samping itu penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk menganalisis penerapan asas-asas pewarisan menurut hukum adat dalam putusan hakim

4. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bersifat akademis maupun praktis. Secara akademis diharapkan dapat menjadi bahan kritik dan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian masa mendatang. Sedangkan secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pembentukan hukum perdata nasional, khususnya yang menyangkut hukum waris.

5. Kajian Pustaka

Hukum waris adat memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri, khas Indonesia yang berbeda dari hukum waris Islam, maupun B.W. Perbedaan itu disebabkan karena latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang berbhineka tunggal ika. Oleh karena itu untuk menyamakan persepsi, dalam hal ini akan diketengahkan pengertian tentang hukum waris adat dari beberapa ahli.

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah : "Aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi pada generasi".⁹

Sedangkan Supomo memberikan pengertian sebagai berikut :

Hukum waris adat memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹⁰

Apabila dibandingkan pendapat Hilman disebutkan :

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi keturunannya.¹¹

Berbeda dengan pemahaman hukum waris adat, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan dengan batasan sebagai berikut :

.....pengertian "warisan" ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹²

⁹ Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Waris Adat*, terjemahan oleh Soebekti Pusponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, h. 197.

¹⁰ Supomo, *op. cit.*, h. 79.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 17.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1976, h. 8.

Perbandingan lain yang hampir sama dengan Wirjono adalah pendapat Klassen-Eggens seperti yang dikutip oleh Soetojo Prawirohamidjojo, yaitu "hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan terjadinya hubungan-hubungan hukum sebagai akibat kematian seseorang, dengan atau tanpa perubahan".¹³

Hukum waris yang mengandung banyak makna serta pengertian berdasarkan sudut pandang banyak pemikir, pada intinya dapat dinyatakan sebagai sebuah proses dalam rangka menyelesaikan seluruh persoalan, baik yang menyangkut hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dari orang yang meninggal dunia.¹⁴

Dari beberapa pengertian hukum waris tersebut tampak bahwa penggunaan istilahnya saja belum didapat kesatuan pemikiran. Supomo menyatakan hukum waris sebagai suatu proses meneruskan dan mengoperkan mempunyai makna yang berkaitan dengan tujuan perkawinan dan peralihan hak untuk selanjutnya demi kepentingan keturunan tersebut diperlukan adanya kekayaan yang dipergunakan sebagai dasar materiel bagi keturunannya. Wirjono, yang menggunakan istilah warisan lebih menunjuk pada cara penyelesaian, bukan mengartikan sebagai bendanya. Sedangkan Hilman lebih lanjut mengupas tentang proses pewarisan atau jalannya pewarisan dengan rumusan sebagai berikut :

proses pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan

¹³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, 2000, h. 1.

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2, Tahun XII, Maret 1982, Jakarta, FH.UI. 1982, h. 154.

penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.¹⁵

Dari penjelasan itu terdapat tolok ukur pembeda antara Supomo, Hilman dan Wirjono serta Klassen-Eggens, yaitu tentang unsur meninggalnya pewaris. Menurut pemahaman hukum adat, proses pewarisan itu telah mulai pada saat orang tua masih hidup, sehingga meninggalnya pewaris tidaklah merupakan syarat mutlak untuk terbukanya harta warisan. Proses tersebut tidak menjadi "*akuut*" oleh karena orang tua meninggal dunia, walaupun memang meninggalnya bapak atau ibu adalah sesuatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan benda-benda dan harta bukan benda tersebut.¹⁶

Hilman mempertegas dengan menyatakan bahwa dari sudut hukum adat pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat (Jawa, *lintiran*) dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.¹⁷ Wirjono memandang unsur meninggalnya orang (pewaris) adalah syarat mutlak. Hal ini memang benar apabila dilihat dari sudut pandang hukum waris Barat (B.W.) atau hukum waris Islam. Penegasan itu termuat di dalam pasal 830 B.W. yang menetapkan "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Namun

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 105.

¹⁶ Supomo, *op. cit.*, h. 82.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 18-19.

demikian walaupun pengertian hukum waris berbeda satu sama lain, mengandung unsur mutlak, yaitu adanya pewaris, harta warisan dan ahli waris.

Pewaris menurut Hilman Hadikusuma adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada ahli waris. Tegasnya pewaris adalah yang mempunyai harta warisan. Harta warisan menurut pemahaman hukum adat dinyatakan sebagai kekayaan materiel dan immateriel (*materiële goederen en immateriële goederen*). Harta tersebut adalah perwujudan dari hak-hak dan kewajiban yang dioperkan serta diteruskan oleh pewaris kepada semua ahli waris sebagai penerima dengan mengingat dan mempertimbangkan pola pewarisan serta sistem kekerabatan (*kewangsaan*) yang berlaku. Dengan demikian harta warisan menurut sistem hukum adat berbeda dengan sistem hukum B.W. apabila hukum Barat (B.W) memandang harta warisan sebagai kesatuan yang abstrak yang dapat dinilai dengan uang untuk dibagi-bagikan. Berdasarkan hukum adat, pembagian harta warisan sesuai dengan jenis barang-barangnya dan bukan didasarkan pada besarnya nilai uang, karenanya sering terjadi antara sesama ahli waris menerima bagian yang tidak sama, akan tetapi hal ini tetap dianggap adil, asalkan barang-barang yang diberikan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsinya. Misalkan sawah atau ladang untuk anak pria yang sudah kuat gawe, sedangkan perhiasan untuk anak wanita.

Aspek ketiga sebagai subyek pewarisan selain pewaris adalah ahli waris. Dalam hal ini yang paling utama dalam generasi berikutnya adalah anak-anaknya yang berstatus anak kandung. Prinsip itu sesuai dengan konteks lembaga hidup waris yang

menyatakan bahwa harta keluarga sejak semula diperuntukkan bagi dasar materiel kehidupan anak dan realisasinya terdapat dalam asas penggantian tempat. Hilman memberikan istilah waris untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan yang terdiri atas ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi *kewarisan* juga dari harta warisan. Sehingga ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi, sedangkan yang bukan ahli waris adalah orang yang *kewarisan*.¹⁸ Lebih lanjut Iman Sudiyat menyebutkan, sebagai proses peralihan harta materiel benda tidaklah bermakna sempit, namun harus ditafsirkan secara luas, sehingga yang dimaksud dengan generasi penerima warisan adalah mereka yang karena adanya hubungan darah, dalam arti garis lurus ke bawah (anak, cucu, cicit, canggah dan lainnya), dalam garis lurus ke atas sebagai pengganti, jika garis lurus ke bawah tidak ada (ayah, ibu, kakek, nenek). Apabila ternyata keturunan karena hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas tidak ada, maka selanjutnya tempat waris digantikan oleh saudara-saudara pewaris beserta keturunan mereka, yang secara keseluruhan tidak diikat oleh ketentuan-ketentuan dari suatu sistem kekerabatan tertentu, sehingga dalam hal tersebut bervariasi sesuai dengan lingkungan sosial adat.

Ketentuan terhadap pengoperan antar generasi tersebut dalam hal ini cucu, tidak merupakan ahli waris dari kakeknya apabila orang tuanya masih hidup. Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung, tertanggal 13 Juli 1976 No. 14K/Sip/1975 menetapkan :

Seorang cucu tidak merupakan ahli waris dari kakeknya meninggal dunia orang tuanya masih hidup, maka ia tidak berhak untuk menuntut pembagian kembali

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 23.

warisan kakeknya yang telah dibagi waris oleh kakeknya itu kepada anak-anaknya.

Sedangkan penggantian tempat (*plaatsvervulling*) dalam garis ke atas (tidak saja menurun) dipertegas kedudukannya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 1959 No. 141K/Sip/1959 yaitu "Penggantian waris dalam garis ke atas juga mungkin, ditinjau dari rasa keadilan". Suatu hal dasar yang perlu diperhatikan, adalah bahwa ketiga unsur yang menjadi komponen fundamental tersebut menjadi aspek yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Oleh karena tanpa adanya pewaris, tidak akan ada ahli waris dan tentunya juga tidak ada harta warisannya. Dengan demikian ketiga unsur tersebut harus dikaji secara korelasi dan komprehensif untuk dapat melahirkan sebuah keputusan hukum yang bertalian dengan peralihan harta benda yang bersifat antar generasi. Pewarisan sebagai fenomena sosial dengan tiga unsur yang harus ada tersebut erat hubungannya dengan masalah kekerabatan, sehingga pola pewarisannya akan tergantung kepada bentuk kekerabatan yang hidup dalam masyarakat tempat pewarisan itu berlangsung. Seperti diketahui, di Indonesia ditemukan tiga bentuk kekerabatan, yaitu : bentuk kekerabatan dengan corak dan sifat yang lebih mencerminkan kebapakan (*patrilineal*), keibuan (*matrilineal*) dan kebapak ibuan (*parental*). Sehubungan dengan pola ketiga bentuk tersebut, maka di Indonesia tidak terdapat homogenitas dalam hukum waris. Walaupun demikian dalam perkembangannya sekarang telah tampak besar pengaruh parental dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kekerabatan (*unilateral*) dalam hal kebendaan dan pewarisan, kecuali di masyarakat pedesaan yang masih bertahan pada sistem

keturunan dan kekerabatannya yang lama.¹⁹

Hal ini relevan dengan pendapat Hazairin :

Hukum adat waris mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.²⁰

Dengan adanya tiga macam corak sistem keturunan tersebut mengakibatkan adanya tiga sistem pewarisan dalam hukum adat, yaitu :

1. sistem pewarisan individual;
2. sistem pewarisan kolektif; dan
3. sistem pewarisan mayorat.

Sistem pewarisan individual mempunyai ciri bahwa setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta peninggalan menurut bagiannya masing-masing. Kekuasaan untuk memiliki ini menyebabkan ahli waris dapat mengadakan perbuatan hukum, sehingga harta warisan yang merupakan bagian (hak)-nya dapat dialihkan (dijual), diusahakan atau dinikmati. Sistem pewarisan individual seperti yang dianut oleh tertib parental ini dilaksanakan, oleh karena faktor tidak adanya hasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama. Faktor penyebab yang lain adalah bahwa ahli waris sudah tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat.

Pada tertib parental ini, seluruh harta benda baik materiel maupun non materiel diperhitungkan sebagai milik kedua orang tua, yang untuk selanjutnya diwariskan

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 33.

²⁰ *Ibid.*, h. 34.

kepada keturunannya dengan tidak mengadakan perbedaan antara pria dan wanita sebagai ahli waris. Hal seperti ini amat berbeda dengan Hukum Islam. Sedangkan dalam hal perhitungan sifatnya non matematik, tentu saja hal ini berbeda dengan hukum perdata barat yang mengadakan perhitungan berdasarkan matematik serba cenderung mengadakan pembagian mutlak pada tiap-tiap waris terhadap suatu harta warisan. Berkaitan dengan sistem kekerabatan parental ini yang merupakan suatu bentuk kekerabatan yang menarik garis keturunan menurut dua sisi, baik sisi ibu, maupun bapak, maka dalam pola pewarisannya tidak ada perbedaan antara kedudukan pria dan wanita.

Di dalam sistem pewarisan kolektif, harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem ini berlaku dalam tertib matrilineal, namun menurut Hazairin seperti yang dikutip Soerjono, sistem kolektif ini berlaku pula dalam masyarakat yang bilateral (Minahasa) dan juga masyarakat patrilineal.²¹ Bahkan di dalam sistem kolektif ini ada kemungkinan berubah menjadi sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian karena ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhan keras milik masing-masing.²²

Berbeda dengan tertib keluarga parental, maka tertib keluarga patrilineal hanya

²¹ Soerojo Wignyodipuro, *op. cit.*, h. 166.

²² Hilman Hadikusuma, *op. cit.*

memiliki satu sisi. Pada tertib patrilineal, sistem keturunan ditarik berdasarkan garis bapak, oleh karenanya, maka kedudukan pria lebih utama dibandingkan dengan kedudukan wanita. Secara lebih luas dapat pula diartikan bahwa pada tertib patrilineal yang menarik garis keturunan kebakapan tidak terbatas pada ayah saja, melainkan juga nenek moyang dan garis keturunan pria, dengan demikian anak pria dapat mewarisi seluruh harta benda dari keluarga pria, baik ayahnya sendiri, maupun kakek serta juga nenek moyang dari garis keturunan pria tersebut. Di samping tertib keluarga patrilineal, pada tertib keluarga matrilinealpun hanya memiliki satu sisi yaitu sisi yang berorientasi kepada sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu, sehingga dalam hal seperti ini, kedudukan pihak wanita lebih menonjol, jika dibandingkan dengan peran dan kedudukan pihak pria dalam bidang pewarisan.

Di dalam sistem pewarisan mayorat, cirinya adalah harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja.²³ Apabila diperhatikan sistem ini dalam hal penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua, seperti yang dikatakan Hilman sebagai berikut :

.....dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, berkewajiban atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-temurun.²⁴

Dengan memperhatikan uraian tentang sistem pewarisan tersebut, maka

²³ Soerojo Wignyodipuro, *op. cit.*, h. 65.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 38.

masyarakat Jawa yang termasuk dalam garis keturunan atau tertib keluarga parental menganut sistem pewarisan individual.

6. Metode Penelitian

6.1. Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hal ini dilakukan karena penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis putusan hakim sesuai dengan asas-asas yang dianut pewarisan hukum adat.

6.2. Bahan hukum yang digunakan sebagai acuan analisis.

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer : putusan-putusan hakim. Penelusuran bahan dilakukan dengan mencopy dari putusan-putusan hakim atau yurisprudensi.

Bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat para ahli yang ditelusuri dari kepustakaan, hasil karya ilmiah para sarjana dan dari hasil-hasil penelitian.

6.3. Langkah penulisan.

- pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan mengcopy dari putusan hakim hakim yang didapatkan dari Pengadilan Negeri, mengcopy dari kutipan putusan hakim dalam Varia Peradilan dan kumpulan-kumpulan yurisprudensi;
- penulisan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kepustakaan, hasil karya

- ilmiah para sarjana dan hasil penelitian;
- setelah bahan hukum primer terkumpul, dikelompokkan berdasarkan kedudukan para waris;
 - langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap putusan, berturut-turut sesuai dengan kelompok kedudukan para waris.

6.4. Analisis bahan hukum.

Dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapatkan akan dianalisis dengan content analysis dan menginterpretasikannya.

7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas pemahaman materi dalam penulisan tesis ini, maka akan diuraikan lebih lanjut mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, di samping itu juga berisi tentang tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II membahas tentang pergeseran asas pewarisan menurut hukum adat, dengan sub pokok bahasan meliputi gambaran umum hukum waris adat, kompetensi mengadili perkara waris, penerapan asas hukum waris dalam putusan hakim dan pergeseran asas pewarisan. Pada Bab III membahas tentang penerapan asas keadilan yang tercermin dalam putusan hakim dan Bab IV tentang Penutup yang terdiri atas kesimpulan berdasarkan pembahasan permasalahan serta saran yang perlu untuk direkomendasikan.

BAB II

PERGESERAN ASAS PEWARISAN DALAM HUKUM ADAT

Pada bab ini dalam upaya untuk menganalisis permasalahan pertama akan diawali dengan bahasan tentang tinjauan umum hukum waris adat yang meliputi terminologi, asas dan sifat, unsur-unsur, sistem serta proses pewarisan menurut hukum adat. Selanjutnya mengupas tentang kompetensi pengadilan dan penerapan asas hukum waris dalam putusan hakim.

1. Gambaran Umum Hukum Waris Adat

Pada dasarnya hukum waris adalah satu aspek di dalam hukum perdata secara keseluruhan. Hukum waris menjadi bagian kecil dari masalah kekeluargaan.²⁵ Di samping itu juga terkait erat dengan aspek lain yaitu masalah kebendaan dan juga ruang lingkup kehidupan manusia (*life cycle*). Sedangkan secara umum susunan urutan atau sistematika persoalan hukum adat menurut van Vollenhoven adalah :

1. susunan persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat (organisasi desa, nagari, juta, kuria, marga);
2. hukum famili;
3. hukum perkawinan;
4. hukum waris;
5. hukum tanah dan air;
6. hukum hutang-piutang;
7. hukum adat delik.²⁶

Menurut Supomo, metode yang dipakai oleh van Vollenhoven untuk melukiskan

²⁵ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1991, h. 1.

²⁶ Supomo, *op. cit.*, h. 22.

hukum adat dalam sistematika uraiannya merupakan suatu hal yang menunjukkan bentuk dan sifat-sifat tersendiri dari sistem hukum adat yang berbeda dengan yang lazim dilukiskan menurut sistem hukum Barat. Suatu hal yang hampir sama, sistematika yang dikemukakan oleh Ter Haar yaitu :

1. susunan masyarakat;
2. hak-hak atas tanah;
3. transaksi-transaksi tanah;
4. perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dengan tanah;
5. hukum perhutangan;
6. Yayasan-yayasan;
7. hukum perseorangan;
8. hukum kesianak-saudaraan;
9. hukum perkawinan;
10. hukum waris;
11. hukum pelanggan.²⁷

Sistematika sebagaimana tersebut apabila dibandingkan dengan sistematika menurut hukum Barat adalah sangat berbeda. Apabila dalam hukum Barat sistematika hukum perdata sebagai berikut :

1. hukum orang;
2. hukum benda;
3. hukum perikatan dan perjanjian, serta
4. hukum pembuktian dan lewat waktu.

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan pembahasan perihal sistematika tersebut pada hakekatnya adalah terletak di dalam pandangan alam pikiran antara masyarakat Barat dan masyarakat Indonesia yaitu menurut pandangan masyarakat Barat yang utama

²⁷ Ter Haar Bzn., *op. cit.*

adalah individu-individu yang ada dalam masyarakat, sedangkan masyarakat Indonesia yang utama adalah masyarakat dalam arti kepentingan masyarakat berada di atas kepentingan individu.

a. Terminologi hukum waris.

Menurut kepustakaan hukum, istilah waris tidak ada keseragaman pengertian. Ada kalanya dipergunakan istilah hukum warisan, hukum kewarisan dan juga hukum waris. Istilah waris sesungguhnya berasal dari bahasa Arab dan terdapat di dalam hukum waris Islam. Di dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah s.a.w. menyatakan "*Ana warisu man la warisahu*" artinya saya mewarisi orang yang tidak ada waris.²⁸ Di dalam hukum Islam, hukum waris berasal dari istilah *ilmul fara'id* atau *ilmul mirats*, istilah ini asalnya dari *fara'id* yang dalam bahasa Arab menunjukkan bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah *faridah* yang berarti suatu ketentuan atau bagian-bagian yang tertentu. Dengan demikian *ilmul fara'id* atau *ilmul mirats* adalah suatu ilmu yang membahas tentang pembagian warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian hukum waris sebagai berikut : "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing". Sedangkan menurut Abdullah Siddik sebagai berikut :

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980, h. 20.

Ilmu fara'id adalah ilmu pembagian pusaka, ilmu yang menerangkan ketentuan-ketentuan pusaka yang menjadi bagian ahli waris. Ia dapat dipecahkan kepada dua bagian besar, yaitu : (1) peraturan-peraturan tentang pembagian, umpamanya penentuan bagian masing-masing dan para ahli waris yang ada, (2) peraturan-peraturan menghitung bagian-bagian itu; bagaimana cara menghitung bagian-bagian dari masing-masing yang berhak atas harta pusaka.²⁹

Dari istilah-istilah tersebut, maka perlu ada penjelasan tentang istilah warisan, peninggalan, pusaka, pewaris, pewarisan dan waris.

(1). **Warisan**

Istilah ini menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri di dalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan, sehingga warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.

(2). **Peninggalan**

Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup.

(3). **Pusaka**

Istilah ini dapat dibedakan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari jaman leluhur, yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi.

Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi di atas ayah, yang kedudukan dan sifatnya tidak mutlak tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan atau pemakaiannya.

(4). **Pewaris**

Istilah ini untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris. Lebih tegasnya pewaris adalah yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan.

(5). **Pewarisan**

Istilah ini dipergunakan untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada para warisnya. Pada saat pewaris masih hidup pewarisan berarti penerusan atau penunjukkan, setelah pewaris meninggal dunia pewarisan berarti pembagian harta warisan.

²⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, Wijaya, Jakarta, 1980, h. 42 - 43.

(6). *Waris*

Istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi "*kewarisan*" dari harta warisan.³⁰

Sedangkan terhadap hukum waris itu sendiri mengandung banyak makna serta pengertian berdasarkan sudut pandang para ahli, yang pada intinya dapat dinyatakan sebagai sebuah proses dalam rangka menyelesaikan seluruh persoalan, baik yang menyangkut hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dari orang yang meninggal dunia. Untuk lebih mempermudah pemahaman terminologi hukum waris, paparan berikut mengenai pemikiran konsepsi dijadikan pegangan pada kajian-kajian berikutnya. Wirjono berpendapat bahwa "warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".³¹ Berbeda dengan Wirjono, Supomo memberikan makna bahwa :

Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriële goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses tersebut menjadi tidak menjadi "*akuut*" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.³²

Persamaan pendapat dengan Supomo, seperti yang dikemukakan oleh Soerojo

³⁰ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 21, 23.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, h. 8.

³² Supomo, *op. cit.*, h. 72.

Wignyodipuro, akan tetapi dari kedua terminologi tersebut Supomo lebih mendetail mendefinisikannya. Di samping itu menurut Supomo, masalah pewarisan dapat saja terjadi dan berlangsung pada saat ketika orang tua masih hidup. Tolok ukur inilah tampak merupakan pencerminan khusus dari sistem hukum adat.

Kedua terminologi yang sudah dikemukakan tersebut menunjukkan adanya spesifikasi, baik subyek, obyek maupun dimensinya. Sedangkan apabila dikaji definisi yang dikemukakan Ter Haar agak berbeda. Ter Haar berpandangan lebih bersifat universal baik subyek, obyek maupun dimensi dari persoalan hukum waris tersebut. Menurutnya, "hukum waris meliputi ketentuan hukum yang mengatur cara penerusan dan pengalihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi, dari abad ke abad".³³

Apabila Ter Haar memberikan makna umum, Pitlo cenderung mengacu secara langsung kepada persoalan, sehingga tampak lebih jelas dibandingkan dengan pandangan yang dikemukakan sebelumnya. Menurut Pitlo, hukum waris dinyakan sebagai berikut :

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³⁴

Dari beberapa batasan makna hukum waris yang beragam tersebut, maka satu hal

³³ Ter Haar Bzn., *op. cit.*, h. 197.

³⁴ A. Pitlo, *Hukum Waris Adat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan M. Arief, Internasa, Jakarta, 1979, h. 1.

dasar perlu diperhatikan adalah bahwa semua rumusan hukum waris tersebut mengandung segi dasar yang tidak berbeda, sebab secara keseluruhannya memandang hukum waris itu menjadi perangkat kaidah tentang cara dan proses peralihan harta kekayaan yang berlangsung antar generasi. Adanya ciri antar generasi dan proses peralihan atas suatu obyek (nilai materiil maupun immateriil) juga tampak pada unsur-unsur makna hukum waris adat yang dinyatakan oleh Iman Sudiyat, terminologi yang dikemukakannya adalah "bahwa hukum waris (adat) meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi".³⁵

Dari beberapa batasan mengenai hukum waris adat tersebut, maka dapat dikaji lebih lanjut makna esensial yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. bahwa pada prinsipnya pewarisan adat adalah suatu proses penerusan dan pengoperan harta benda maupun "*harta cita*" dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya atau keturunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup, sehingga penguasaan harta benda dapat berlangsung dan terjadi baik pada saat pemiliknya masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia. Meninggalnya orang pewarisan tetap sebenarnya tidak mempengaruhi secara radikal proses tersebut. Dengan demikian wawasan adat sehubungan dengan itu memiliki prinsip esensial dan berbeda-beda secara prinsipiil dengan wawasan hukum lainnya yang hanya berorientasi pada satu dimensi setelah pemilik

³⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, h. 151.

meninggal dunia saja. Walaupun proses warisan adat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum lain dalam hal unsur meninggalnya pewaris, namun mekanisme pewarisan itu sendiri dipengaruhi oleh sikap serta keputusan yuridis yang ditentukan oleh pemilik asal, oleh karena hal itu berhubungan dengan sistem keturunan;³⁶

- b. bahwa istilah pewarisan mengandung dua arti yaitu (1) dalam arti perolehan hak-hak dan kewajiban dari pewaris kepada waris, (2) dalam arti penerusan hak-hak dan tanggung jawab kekeluargaan dari pewaris kepada para waris. Dengan demikian penggunaan istilah pewarisan berarti mencakup hukum formal yaitu tentang cara bagaimana melaksanakan penerusan, peralihan atau pembagian dari harta warisan dari pewaris yang meninggalkan harta peninggalan kepada para waris yang akan menerimanya;
- c. bahwa di dalam hukum waris adat dikenal adanya penggantian ahli waris. Ketentuan tentang penggantian ahli waris merupakan akibat dari aliran pikiran yang menyatakan harta benda itu disediakan sebagai dasar materiil kehidupan keluarga dan keturunannya. Apabila seorang anak meninggal dunia, sedangkan orang tuanya masih hidup, maka anak-anak dari orang yang telah meninggal dunia itu bersama-sama menggantikan bapaknya sebagai ahli waris dalam harta benda kakek neneknya. Demikian pula pendapat Mahkamah Agung bahwa untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang meninggalkan warisan ada pada keturunan

³⁶ Iman Sudiyat, *op. cit.*, h. 158 - 162.

dalam garis menurun (Putusan tanggal 18-3-1959 Reg. No. 391/k/Sip/59). Lebih lanjut Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggantian ahli waris dalam garis ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan (Putusan tanggal 10-10-1959 Reg. No. 141 k/Sip/59).

b. Asas dan sifat hukum waris adat.

Menyimak rumusan hukum waris adat tersebut, dalam kenyataannya tidak ada peraturan yang seragam, apalagi tolok ukur tertentu bagi berbagai lingkaran hukum. Namun demikian dapatlah dirumuskan adanya asas-asas umum. Hal demikian ini seperti yang dikemukakan oleh Iman Sudiyat sebagai berikut :

Ketunggalan dan kebhinekaan hukum adat mudah ditunjukkan di lapangan hukum waris. Kita dapat menyusun ketentuan-ketentuan pokok dan asas-asas yang berlaku sangat umum, tetapi tidak dapat merumuskan satu norma yang menunjukkan bentuk yang sama di semua lingkungan hukum.³⁷

Asas umum yang dimaksud tersebut adalah dikemukakannya pernyataan tentang ahli waris utama dan pertama dari pemilik Bumi Putra yang meninggal ialah anak-anaknya, namun pernyataan itu hanya benar sebagian, hal ini dibuktikan dengan kenyataan sebagai berikut :

1. di tanah Batak hanya benar terhadap anak-anak laki-laki;
2. di tanah Minangkabau hanya benar kalau yang meninggal si ibu; dalam yang meninggal ayah, maka yang mewaris ialah generasi muda keturunan wangsaw/sanaknya perempuan (kakak dan adiknya) bukan keturunan (dia dan isterinya);

³⁷ Iman Sudiyat, *op. cit.*, h. 174.

3. di wilayah Lampung yang mewaris hanyalah anak tertua dengan kewajiban memperlakukan keluarga ayahnya sebagai keluarga sendiri.³⁸

Sedangkan Hilman dengan pangkal tolak berfikir dari Pancasila menguraikan unsur-unsur pandangan hidup Pancasila sebagai asas dalam proses pewarisan agar supaya penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Asas-asas yang dimaksud adalah :

1. asas Ketuhanan dan pengendalian diri;
2. asas kesamaan hak dan kebersamaan hak;
3. asas kerukunan dan kekeluargaan;
4. asas musyawarah dan mufakat;
5. asas keadilan dan parimirma.³⁹

Dengan penjabaran sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tersebut, maka di dalam hukum waris adat tidak saja semata-mata terdapat asas kerukunan dan kesamaan hak saja melainkan mempunyai pandangan lebih luas yang menyangkut tentang musyawarah serta keadilan.

Berpijak pada bentuk hukum adat tidak tertulis yang corak dan pertumbuhannya diserahkan kepada kesadaran hukum masyarakat sendiri tentang segala sesuatunya yang dianggapnya adil, maka tak terkecuali perihal sifat khas yang dimilikinya berbeda dengan sistem hukum lain. Terhadap harta warisan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, loc. cit., h. 31.

menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta benda keluarga tidak merupakan kesatuan, disebabkan ada pemisahan antara harta usaha sendiri, harta pusaka, harta gono-gini, harta yang dihadiahkan masing-masing baik dari pihak suami ataupun dari pihak isteri. Hal ini ditinjau dari sudut asal diperolehnya barang tersebut.

Selain itu perbedaan selanjutnya adalah ditinjau dari sudut macamnya barang, seperti sawah, ladang, rumah, keris pusaka, perhiasan. Harta warisan adat dibedakan dalam 2 golongan yang terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagi penguasaan dan pemilikannya dan harta benda yang dapat dibagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Harta yang tidak dapat dibagi-bagikan merupakan harta milik bersama para waris dan tidak dapat dimiliki secara perorangan melainkan hanya dapat dipakai dan dinikmati.

Pengertian dari benda tidak dapat dibagi-bagi adalah harta warisan tersebut memang tidak dapat dibagi-bagikan penggunaannya karena sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi misalnya alat perlengkapan adat, jabatan adat, gelar adat yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Adapun kemungkinan tidak terbagi-baginya harta peninggalan itu dikarenakan kepentingan dan kegunaannya sebagai pemersatu kekerabatan.⁴⁰

Pernyataan tentang harta tidak boleh dimiliki secara perseorangan dan hanya

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, h. 51.

dapat dipakai dan dinikmati itulah tentunya bertentangan dengan ketentuan pasal 1066 B.W. alinea pertama yaitu "Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi".

Perbedaan lain yang merupakan sifat khusus dari hukum waris adat adalah tidak dikenalnya asas "*legitieme partie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat, yaitu untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 B.W. atau di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'.⁴¹

c. Unsur-unsur pewarisan.

Pewarisan sebagai fenomena sosial, pada hakekatnya mengandung 3 unsur yaitu adanya seseorang sebagai dan berkedudukan peninggal warisan, didapatnya satu atau beberapa orang sebagai dan berkedudukan ahli waris serta adanya harta warisan berupa kekayaan yang ditinggalkan dan akan beralih penguasaannya kepada ahli waris. Setiap unsur di dalam pewarisan memiliki beberapa ketentuan yuridis yang mendasar.

Walaupun pengertian pewaris (*erflater*) menurut hukum barat, hukum adat dan hukum agama pada dasarnya sama, akan tetapi kedudukan pewaris masih dapat dibedakan antara pewaris yang satu dengan yang lain, antara pewaris menurut

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, h. 20.

hukum barat, hukum adat dan hukum agama.⁴² Menurut hukum barat, pasal 830 B.W. disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sehingga unsur meninggalnya seseorang merupakan syarat mutlak. Di samping hal tersebut dalam hukum barat kapan seseorang itu mati memerlukan kepastian, oleh karena kematian pewaris membawa akibat pewarisan.

Ketetapan waktu kapan seseorang (pewaris) sudah meninggal dunia tidak diatur dan tidak berlaku dalam hukum adat. Menurut hukum adat pewarisan dapat berlangsung ketika pewaris masih hidup.

Unsur kedua yang berkedudukan sebagai subyek dalam hukum waris adalah ahli waris (*erfgenaam*) yaitu seseorang atau beberapa orang yang menerima harta. Hilman Hadikusuma memberikan istilah *para waris* yang mengelompokkan ke dalam dua golongan yaitu waris yang ahli waris dan waris yang bukan ahli waris, sehingga para waris mempunyai maksud semua orang yang (akan) menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.⁴³

Surojo Wignjodipuro berpendapat bahwa pengertian ahli waris menimbulkan persoalan yaitu bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara si peninggal warisan di satu pihak dengan para ahli waris di lain pihak, agar harta kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada para ahli waris.⁴⁴

⁴² Pitlo, *op. cit.*, h. 5.

⁴³ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 77.

⁴⁴ Surojo Wignjodipuro, *op. cit.*, h. 182.

Dengan adanya persoalan yang timbul ini, maka tiap-tiap masyarakat di Indonesia yang terdiri dari macam-macam sifat pewarisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berkaitan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sehubungan dengan kedudukan ahli waris tersebut, Iman Sudiyat memberikan batasan tentang sistem keutamaan dan sistem penggantian. Sistem keutamaan meliputi pembagian semua orang yang mungkin berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris dalam golongan atau kelompok, dengan pengertian bahwa kelompok yang lebih utama menutup kelompok yang sekunder dari hak waris. Sedangkan sistem penggantian adalah cara penyingkiran orang-orang tertentu dari kelompok keutamaannya, orang-orang tersebut tidak mewaris, sebab antara mereka dengan si pewaris terdapat penghubung yang masih hidup.⁴⁵ Dengan demikian, maka sisa dari penyingkiran itulah yang benar-benar berhak mewaris dalam kelompok keutamaan yang bersangkutan. Lebih rinci lagi, Iman Sudiyat menggolongkan sistem keutamaan dalam 7 kelompok yaitu :

- (I) Keturunan/anak beserta keturunannya : "garis bawah";
- (II) Orang tua (Ayah dan Ibu) : garis atas "taraf pertama";
- (III) Saudara beserta keturunannya : "garis sisi pertama";
- (IV) Orang tua dari orang tua (berjumlah 4 orang) : garis atas "taraf kedua";
- (V) Saudara dari orang tua beserta keturunannya : "garis sisi kedua";

⁴⁵ Iman Sudiyat, *Kertas Kerja untuk Simposium Hukum Waris Nasional*, Pebruari 1983, h. 13.

(VI) Orang tua dari orang tua dari orang tua (berjumlah 8 orang) : garis atas "taraf ketiga";

(VII) Saudara dari orang tua dari orang tua beserta keturunannya dari saudara tersebut : "garis sisi ketiga".⁴⁶

Apabila merujuk kepada pendapat Hilman, pernyataan tentang kedudukan ahli waris sebagai berikut :

"Oleh karena pewarisan itu merupakan proses penerusan harta warisan kepada keturunannya, maka yang bertindak sebagai ahli waris utama adalah anak-anak yang dilahirkannya".

Pada garis keturunan parental di antara para waris pria dan wanita diadakan pembagian merata. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1-11-1961 No. 179/Sip/1961 juga menyatakan hal yang sama yaitu anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan. Akan tetapi adakalanya di beberapa daerah lain berlaku bagian anak lelaki lebih banyak dari bagian anak wanita, misalnya Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah "*makkunrai majjujung, oroanewe mallempaa*" yang maksudnya wanita menjunjung, pria memikul (istilah Jawa "*sepikul segendong*").

Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali dan juga tidak mempunyai anak "*pupon*", maka harta warisan akan diwarisi oleh anggota keluarga

⁴⁶ Iman Sudiyat, *Ibid.*, h. 14.

lain, secara berturut-turut pengelompokkannya yang berlaku di Jawa sebagai berikut :

- (I). Orang tua bapak atau ibu pewaris;
- (II). Saudara-saudara kandung pewaris dan keturunannya;
- (III). Kakek atau nenek pewaris;
- (IV). Saudara-saudara pria atau wanita dari bapak ibu pewaris;
- (V). Anggota keluarga lain.

Ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan adalah berlakunya asas kekeluargaan demi kerukunan dan kedamaian dalam hidup berkeluarga. Di dalam hal anak-anak pewaris meninggal dunia terlebih dahulu dan masih ada cucu, maka tampilah cucu sebagai ahli waris yang berkedudukan sebagai menggantikan tempat dari yang meninggal dunia. Apabila diperhatikan, pengertian ahli waris beserta urut-urutannya tidak ada hal yang unik dan pelik dalam hukum adat waris dalam lingkungan masyarakat hukum parental. Keunikan akan timbul dalam masyarakat hukum patrilineal dan masyarakat hukum matrilineal.

Menurut definisi hukum adat waris, harta warisan harus dipandang sebagai harta benda baik yang nyata/materiele atau immateriel yang pembagiannya menurut jenis, fungsi maupun sifatnya. Hal ini dapat diartikan bahwa harta benda dapat dilihat kenyataannya sebagai harta asal, harta gono gini atau sebagainya. Dengan demikian harta warisan menurut sistem hukum adat berbeda dengan sistem hukum barat, apabila sistem hukum barat memandang harta warisan sebagai kesatuan yang abstrak yang dapat dinilai dengan uang untuk dibagi-bagikan secara ilmu hitung.

Sedangkan berdasarkan hukum adat pembagian harta warisan sesuai dengan jenis barangnya dan bukan kepada besarnya nilai uang, oleh karenanya sering terjadi antara sesama pewaris menerima bagian yang tidak sama. Namun hal ini tetap dianggap adil asalkan barang-barang yang diberikan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsinya. Misalkan sawah atau ladang untuk anak laki-laki yang sudah kuat gawe, sedangkan perhiasan untuk anak perempuan.

Pada uraian berikut akan dipaparkan tentang masing-masing status harta benda dalam keluarga yang meliputi harta pusaka, harta asal dan harta gono gini.

Harta Pusaka

Harta pusaka ini sebagai harta milik keluarga besar yang turun-temurun dan umumnya tidak dapat dibagi-bagi, sebab harta pusaka tersebut bukan sebagai milik pribadi suami atau isteri yang dibawa ke dalam perkawinan, melainkan sebagai harta bersama dari beberapa keluarga seketurunan. Hak dari keluarga itu hanyalah sebagai pemakai atau penguasa saja. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini di beberapa lingkungan hukum adat disebabkan karena sifatnya yang memang tidak memberi kemungkinan untuk tidak memiliki barang itu bersama-sama dengan ahli waris lain-lainnya, sebab harta dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi atau barang itu merupakan lambang persatuan serta kesatuan daripada keluarga yang bersangkutan.⁴⁷

⁴⁷ Surojo Wignjodipuro, *op. cit.*, h. 47.

Harta Asal

Pengertian harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak permulaan, baik berupa harta peninggalan atau pun harta bawaan (gawan) yang dibawa ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya.⁴⁸

Sedangkan S.A. Hakim membedakan harta asal menjadi dua yaitu :

1. barang-barang sebelum pewarisan;
2. barang-barang selama dalam ikatan perkawinan.

Barang asal yang diperoleh sebelum perkawinan terjadi karena :

- a. barang yang tiap isteri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan;
- b. barang yang dipunyai isteri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing;
- c. barang yang diperoleh karena pewarisan; dan
- d. barang yang diperoleh karena pemberian orang lain.

Pertambahan barang asal selama perkawinan terjadi karena mereka secara sendiri-sendiri sebagai usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain. Selama perkawinan itu pula harta asal bertambah karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena hadiah yang jatuh kepada salah seorang suami atau isteri saja.⁴⁹

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 47.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *loc. cit.*

Harta Gono Gini

Harta gono gini dimaksudkan sebagai harta yang didapat suami isteri bersama selama perkawinan. Sehubungan dengan itu putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No. 51/K/Sip/1956 menyatakan "menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri".⁵⁰

Menurut terjadinya harta gono gini ini karena baik antara suami atau isteri selama perkawinan berusaha atau bekerja dan hasilnya menjadi milik bersama.

Selanjutnya status harta benda itu dalam suatu keluarga berdasarkan macam atau jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Apabila dalam suatu perkawinan diperoleh keturunan, maka status harta tersebut tidaklah menjadi permasalahan, sebab baik barang asal suami atau barang asal isteri dan barang gono gini akan dioperkan kepada anak-anaknya. Permasalahan timbul dalam keluarga apabila dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan.

Dalam hal terjadi demikian, hukum waris adat (Jawa) menentukan bahwa barang gawan tetap berada dalam pengawasan masing-masing. Demikian pula ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 juga menyatakan hal yang sama bahwa "harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Sedangkan pasal 35 ayat (2)

⁵⁰ *Ibid.*, h. 70.

nya menyebutkan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". Oleh karena harta gono gini dalam tertib parental tersebut sebagai "*srayane wong loro*" (milik dua orang), maka merupakan harta tak terbagi bila perhubungan tetap berlangsung lestari. Sebaliknya apabila perkawinan putus, gono gini menjadi harta terbagi antara suami isteri, meskipun selama perkawinan si isteri secara diam-diam pernah meninggalkan suaminya. Hal ini dipertegas oleh putusan Mahkamah Agung No. 51/K/Sip/1956 tanggal 7 September 1956, yang dirumuskan "di dalam hukum adat tidak terdapat ketentuan bahwa seorang isteri tidak berhak lagi atas gono gini, apabila ia dengan diam-diam lari dari suaminya".

d. Sistem pewarisan.

Ketentuan hukum waris adat merupakan ketentuan yang tidak bersifat netral, maka ia sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, demikian juga oleh ketentuan-ketentuan hukum asing yang sejenis, serta ketentuan-ketentuan hukum agama yang juga mengatur soal warisan.⁵¹

Bangsa Indonesia dengan coraknya yang beragam, baik dalam agama, budaya, nilai-nilai serta sistem masyarakatnya telah ada sebelum masuknya agama Hindu, Islam maupun Kristen, ternyata menciptakan corak dan alam pikiran konvensional. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat dengan beragam model kekerabatannya, tidak berarti untuk setiap bentuk kekerabatan yang

⁵¹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat)*.

sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama. Hal itu disebabkan karena di dalam sistem keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya, misalnya perbedaan dalam sistem perkawinan. Terhadap masyarakat adat Batak dan masyarakat Lampung beradat Pepadun menganut sistem keturunan patrilineal tetapi di kalangan orang Batak berlaku adat perkawinan *manunduti* yaitu mengambil isteri dari satu sumber yang searah (dari kerabat *hula-hula*), sedangkan di kalangan orang Lampung berlaku adat perkawinan *ngejuk ngakuk* (ambil beri) yaitu mengambil isteri dari sumber yang bertukar. Untuk selanjutnya menurut hukum Batak jika tidak ada keturunan laki-laki berarti generasi itu terputus, sedangkan menurut hukum adat Lampung, keturunan yang putus dapat diganti.

Pada paparan berikut perlu dikaji lebih lanjut tentang tiga model sistem pewarisan adat, ialah sebagai berikut :

1. Sistem pewarisan individual.

Pewarisan dengan model sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan yang memberikan hak kepada setiap waris untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Apabila harta warisan telah dibagi, maka masing-masing waris dapat menguasai bagian harta warisannya untuk diusahakannya, dinikmati atau dialihkan kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga atau orang lain.

Sistem individual ini berlaku di dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan parental. Adapun faktor yang menyebabkan perlunya dilaksanakan pembagian warisan secara individual ini adalah karena tidak ada lagi yang

berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama. Hal ini dikarenakan para waris tidak lagi terikat pada rumah tangga orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing ahli waris telah tersebar tempat kediamannya. Model pewarisan dengan sistem individual ini memiliki segi kebaikan di samping juga sisi kelemahan. Kebaikan dari sistem ini adalah bahwa dengan pemilikan secara pribadi, maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota keluarga lain. Adapun kelemahannya adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan antara keluarga waris yang satu dengan yang lain. Dengan keadaan seperti ini berarti lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong menolong antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain seketurunan dan apabila mengarah kepada sifat individualisme dan materialisme menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.

2. Sistem pewarisan kolektif.

Model pewarisan dengan sistem kolektif yaitu sistem yang menentukan bahwa ahli waris mewaris harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya, melainkan setiap waris berhak mengusahakan dan mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Sistem pewarisan kolektif ini terdapat di dalam tertib matrilineal. Di Minangkabau, model kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di

bawah pimpinan atau penguasaan mamak kepala waris, sedangkan para warga kerabat hanya mempunyai hak pakai (Minang = ganggam bauntik). Dengan demikian sistem pewarisan kolektif harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan tidak dimiliki secara pribadi oleh anggota keluarga/kerabat bersangkutan. Para anggota keluarga boleh memanfaatkan tanah pusaka itu untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya tetapi tidak boleh dimiliki sebagai hak milik perorangan. Terhadap pengaturan cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota kerabat bersangkutan.

Ada kemungkinan di dalam sistem kolektif ini bergeser ke arah sistem individual apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian karena ulah dari para anggotanya ditanami tumbuhan keras milik masing-masing. Mereka telah mengolah tanah dan menikmati hasilnya secara terus-menerus, maka atas kesepakatan bersama diadakan pembagian sesuai dengan intensitas usaha masing-masing. Di samping itu pergeseran sistem ini disebabkan karena harta bersama tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh dan untuk kepentingan bersama, demikian pula karena lemahnya fungsi dan peranan pimpinan milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama tadi.

Pada masa sekarang sistem pewarisan kolektif ini menunjukkan adanya kelemahan yang disebabkan karena :

- a. banyak di antara anggota kelompok keluarga/kerabat waris yang pergi merantau meninggalkan kampung halaman;
- b. tidak adanya anggota keluarga/kerabat atau tua-tua kerabat yang mau

- mengurus dan memeliharanya;
- c. tanah pusaka terbengkalai tidak diurus dan diusahakan, rumah pusaka lambat laun menjadi lapuk dan rubuh;
- d. sering terjadinya perselisihan di antara anggota kelompok keluarga/kerabat dikarenakan ada di antaranya yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi, atau mentransaksikannya secara pribadi dengan pihak ketiga.⁵²

Adapun kebaikan yang tampak dari sistem ini apabila harta yang dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup kerabat, baik masa kini maupun masa mendatang masih tetap berperan, demikian pula tolong menolong antara satu dengan lainnya di bawah pimpinan kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan.

Namun demikian tampak pula kelemahan dari penerapan sistem ini, yaitu menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit, kurang terbuka bagi orang luar. Di samping itu oleh karena tidak selamanya kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan, maka rasa setia kawan dan setia kerabat menjadi luntur. Di daerah Lampung tampak tanah-tanah milik bersama menjadi terbengkalai dikarenakan para punyimbang (kepala kerabat) bersangkutan tidak dapat bertahan mengurus kepentingan bersama dengan baik.

3. Sistem pewarisan mayorat.

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan dan pengalihan hak serta penguasaan atas harta yang tidak dibagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai

⁵² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 17.

pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga. Hal ini berarti sistem mayorat mempunyai ciri bahwa harta peninggalan orang tua (harta pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap untuk tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua lelaki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang sudah meninggal berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mampu berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-temurun. Seperti halnya dalam sistem pewarisan kolektif, setiap ahli waris dari harta bersama itu mempunyai hak memakai dan menikmatinya, tanpa hak memilikinya secara perseorangan. Perbedaannya adalah, pada sistem mayorat anak tertua berkedudukan sebagai penguasa tunggal menggantikan ayahnya (di Lampung) atau menggantikan ibunya (Semendo) atas dasar musyawarah mufakat para anggota kelompok waris yang lain. Sedangkan pada sistem kolektif harta peninggalan itu dikuasai oleh mamak kepala waris (Minangkabau).

Terjadinya model sistem pewarisan mayorat pada hakekatnya merupakan akibat dari perbedaan sistem keturunan yang dianut. Dengan demikian, maka sistem mayorat terbagi dalam dua macam yaitu :

a. *mayorat laki-laki*, yaitu apabila anak atau keturunan laki-laki tertua atau sulung pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal. Sistem ini berlaku di lingkungan masyarakat Lampung yang beradat pepadun dan juga di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Jaya;

b. *mayorat perempuan*

Sistem pewarisan mayorat perempuan adalah anak perempuan yang tertua merupakan ahli waris. Sistem mayorat ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal itulah, maka di daerah Lampung yang memimpin, mengurus dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak *punyimbang*, yaitu anak laki-laki tertua dari isteri tertua. Keadaan demikian ini juga berlaku di Teluk Yos Soedarso Irian Jaya. Sedangkan di daerah Semendo, Sumatera Selatan yang mengurus dan menguasai harta peninggalan adalah anak tunggal yaitu anak perempuan tertua sebagai penunggu harta orang tua.

Sebagaimana yang berlaku terhadap sistem pewarisan kolektif, sistem pewarisan mayorat juga mempunyai kelemahan dan kekuatan, yaitu terletak pada kepemimpinan dari anak-anak tertua tersebut dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia dalam hal mengurus harta kekayaan guna kepentingan anggota kerabat.

Anak tertua yang penuh tanggung jawab, dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan kerabat sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat hidup mandiri. Sebaliknya apabila anak tertua tidak bertanggung jawab, mempunyai sifat

pemboros dan materialistis tentu saja tidak dapat mengurus dan melaksanakan kewajibannya sebagai anak punyimbang atau anak tunggu tubang.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelemahannya dilihat dari keutuhan dan terpeliharanya harta bersama itu tergantung kepada pihak yang mengurusnya atau kekompakan kelompok kerabat yang mempertahankannya. Menurut Hilman Hadikusuma, di lingkungan masyarakat adat Lampung Tulangbawang ditemukan kenyataan sebagai berikut :

- a. tanah atau rumah pusaka tinggi peninggalan kakek ke atas ditunggu orang tua-tua atau diupahkan kepada orang lain untuk menjaga atau mendiaminya;
- b. tanah atau rumah pusaka tinggi di pedesaan asli ditinggalkan terbengkalai, dan yang berupa tanah kebun tua tidak lagi dimanfaatkan, sehingga terjadi pemakaian atau transaksi yang tidak sah;
- c. tanah atau rumah pusaka rendah hasil pencarian orang tua ketika hidupnya, di kampung atau di kota perantauan, dilakukan pembagian seimbang merata oleh para waris;
- d. tanah atau pusaka rendah diurus oleh suatu yayasan keluarga para waris yang berbadan hukum dengan akta notaris untuk kepentingan umum, menjadi wakaf bagi kemaslahatan pendidikan umum atau keagamaan (untuk bangunan sekolah atau rumah ibadah dan sebagainya).⁵³

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan itu, ternyata bahwa telah terjadi pergeseran dan bahkan terhadap harta pencarian mengarah kepada sistem pewarisan individual seperti halnya yang berlaku pada tertib parental.

e. Proses pewarisan.

Seperti telah dipahami bahwa sistem pewarisan adat tidak rumit sebagaimana sistem hukum waris lainnya yang berlaku, baik B.W. maupun Hukum Islam. Hal ini

⁵³ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 19.

disebabkan karena sifat hukum adat itu sebagian besar tidak tertulis dalam bentuk perundangan (kodifikasi) dan tidak terkaitnya dengan sistem peradilan yang tetap. Semua persoalan waris diatur dan ditentukan berdasarkan asas kekeluargaan dengan musyawarah mufakat keluarga/kerabat. Dengan demikian walaupun berlaku sistem pewarisan individual, kolektif dan mayorat bukan berarti pewarisan itu tidak dapat berubah, melainkan sangat luwes untuk mengikuti perkembangan. Proses penerusan dan pengoperan harta menurut hukum adat senantiasa dapat berubah mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan para waris dan perkembangan jaman.

Proses pewarisan atau mekanisme pewarisan yang dimaksud adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris. Adapun jalannya pewarisan menurut hukum waris adat dilakukan pada saat ketika pewaris masih hidup dan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris meninggal dunia. Pada bagian berikut ini diuraikan tentang proses pewarisan menurut hukum adat :

e.1. Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia.

Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris sebelum pewaris meninggal dunia, dapat terjadi dengan cara penunjukkan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris atau dengan cara berpesan atau berwasiat. Berlangsungnya proses ini disebabkan karena anak sudah mulai menikah ("*mentas*") yang diharapkan melalui proses ini dapat dijadikan modal atau sebagai dasar kebendaan untuk

kelanjutan hidup anak-anak mereka.

Kedudukan orang tua dalam pandangan mereka memiliki kewajiban agar anak-anaknya memiliki kemandirian terutama pada saat mereka telah membentuk sebuah rumah tangga. Pemberian dasar kebendaan itu berdasarkan atas pendapat "*durung ludang*" (belum selesai) kewajiban orang tua apabila anak yang telah dikawinkan belum dipisah ("*mencar*"). Oleh karena itu, maka apabila anak laki-laki atau anak wanita mulai hidup berumah tangga mandiri, kewajiban orang tua membekali keluarga baru itu dengan pemberian bidang tanah, dan atau barang-barang lainnya untuk modal anaknya membina rumah tangga barunya. Di samping itu selaras dengan asas hukum waris adat, terdapat tujuan lain, yaitu agar kelak di kemudian hari setelah pewaris meninggal dunia, harta yang menjadi harta warisan itu tidak menjadikan konflik antara sesama waris dan berakibat putusnya tali persaudaraan.

Berlangsungnya pewarisan menurut hukum adat dapat secara "*lintiran*" yaitu apabila terjadi pemberian harta peninggalan yang pengalihan haknya kepada waris, ketika pewaris masih hidup sudah terjadi.⁵⁴ Dari dasar pemahaman itulah, maka pengalihan hak atas kedudukan/jabatan adat, harta pusaka atau harta pencarian berupa tanah pekarangan, tanah sawah, kebun atau ladang telah berlaku di masa pewaris masih hidup.

Di dalam pemberian bekal dari sebagian harta peninggalan itu

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 229.

adakalanya jenis harta yang diberikan kepada anak laki-laki berbeda dengan anak wanita, namun juga tidak dibedakan tergantung pada pertimbangan orang tua (pewaris) menurut kesediaan, keadilan dan kemampuannya. Di Lampung bagi anak laki-laki tertua diberikan harta (tanah) pusaka dan bangunan rumah (kerabat) atau hasil pencarian pewaris, terhadap anak perempuan diberikan pakaian, perhiasan dan perabot rumah tangga sebagai "*sessan*" (harta bawaan).

Selain "*lintiran*", proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia adalah dengan cara *penunjukkan* atau "*dijengken*" menurut istilah Lampung atau *cungan* menurut Jawa. Cara penunjukkan terjadi apabila bagian-bagian harta peninggalan tertentu telah ditunjukkan bagi para waris yang akan mewarisi oleh pewaris ketika hidupnya, tetapi peralihan hak miliknya baru terjadi apabila pewaris meninggal dunia.

Dalam hal demikian ini berarti sementara pewaris masih hidup, pengurusan, pengolahan, pemanfaatan, pengambilan hasil dari harta peninggalan itu tetap masih dikuasai oleh pewaris. Sedangkan para waris yang bersangkutan dapat membantu pengurusannya. Khusus yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Jawa, *cungan* ini dapat berupa "*garisan*" yaitu penunjukan terhadap bidang-bidang tanah dengan menyatakan batas-batas tanahnya. Di samping itu dapat juga berlangsung secara "*perangan*" yaitu penunjukan terhadap lainnya yang tidak tentu dan bermacam-macam, misalnya

alat perabotan rumah tangga, perhiasan dan ternak.⁵⁵

Adakalanya bentuk proses pewarisan itu dilakukan dengan cara hibah yaitu apabila bagian harta peninggalan tertentu diberikan oleh pewaris kepada seseorang yang bukan ahli waris, misalkan kepada anak asuh, anak pungut, anak tiri. Apabila peralihan hak miliknya baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia disebut dengan *hibah wasiat*, dalam hal ini dapat terjadi pula dari suami kepada isteri atau dari paman kepada kemenakan. Kebiasaan yang sering dilakukan pada masyarakat adat Jawa juga dapat terjadi melalui cara "*welingan*" atau "*wekasan*" yaitu pesan dari pewaris kepada anggota keluarga, anak, isteri tentang bagaimana seharusnya harta peninggalannya akan dibagi dan diselesaikan apabila meninggal dunia.

Dari uraian tentang proses pewarisan pada saat sebelum pewaris meninggal dunia, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pewarisan dilakukan secara penerusan (*lintiran*); penunjukan (*cungan*, *dijengken*); garisan; perangan dan hibah (*welingan*, *wekasan*, *hibah wasiat*). Beberapa cara itu dapat dinyatakan dengan lisan yang disaksikan para anggota keluarga atau perangkat desa agar menjadi terang dan tidak menimbulkan perselisihan di antara para waris di kemudian hari. Perkembangan masa kini menurut pengamatan Hilman, cara-cara proses pewarisan tersebut dibuat secara tertulis dan didaftarkan kepada notaris.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, h. 231.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 233.

e.2. Proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia.

Pada umumnya apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah tentang kekayaan tersebut dibagi-bagikan atau tidak. Apabila dibagi-bagi, maka siapa sajakah yang berhak dan bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta tersebut. Terhadap harta yang tidak terbagi, maka yang terjadi adalah penguasaan harta dan harta yang dibagi dilaksanakan dengan pembagian harta. Pada paparan berikut diuraikan tentang penguasaan harta dan pembagian harta.

e.2.1. Penguasaan harta.

Penguasaan atas harta warisan terjadi apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi yang disebabkan karena harta tersebut merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota kerabat pewaris dan karena pembagiannya ditangguhkan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tertentu yang dimaksud adalah :

- a. masih ada orang tua;
- b. terbatasnya harta peninggalan;
- c. tertentu jenis dan macamnya;
- d. pewaris tidak mempunyai keturunan;
- e. para waris belum dewasa;
- f. belum ada waris pengganti;
- g. di antara waris belum hadir;

- h. belum ada waris yang berhak; dan
- i. belum diketahuinya hutang piutang pewaris.⁵⁷

Dengan demikian setelah pewaris meninggal, harta warisan yang tidak dibagi atau ditangguhkan pembagiannya akan dikuasai janda, anak, anggota kerabat lainnya atau tua-tua adat kekerabatan.

Penguasaan orang tua.

Sehubungan dengan meninggalnya salah satu dari orang tua, maka sebelum harta peninggalan itu diadakan pembagian bagi para waris, semua harta dikuasai oleh ayah atau ibu yang masih hidup untuk kepentingan kelanjutan hidup anak-anak dan janda atau duda yang ditinggalkan.

Yurisprudensi tentang penguasaan harta oleh janda/duda, baik terhadap harta asal maupun harta pencarian antara lain Keputusan Mahkamah Agung tanggal 26 Oktober 1960 No. 307 k/Sip/1960; Keputusan Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1960 No. 320 k/Sip/1960; Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1958 No. 54 k/Sip/1958. Apabila di dalam harta peninggalan terdapat harta pusaka milik bersama anggota kerabat, maka dalam penguasaan, pengelolaannya dan pemanfaatannya dilaksanakan oleh janda atau duda bersama-sama dengan saudara-saudaranya menurut struktur kekerabatannya masing-

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980, h. 54.

masing. Dengan tolok ukur itu, maka di dalam susunan patrilineal berarti bersama dengan saudara ayah yang laki-laki; dalam susunan matrilineal bersama dengan saudara ibu yang laki-laki dan dalam susunan yang parental dengan saudara ayah dan ibu yang pria dan wanita.

Penguasaan anak.

Harta warisan di bawah penguasaan anak apabila janda/duda sudah tua dan anak-anak sudah dewasa serta sudah berumah tangga. Namun demikian, adakalanya mengenai beralihnya kedudukan dan harta pusaka kepada ahli waris antar daerah terdapat perbedaan. Hal ini terjadi di Lampung yaitu anak walaupun sudah dewasa, jika belum beristeri menurut tata tertib adat, ia belum berhak sepenuhnya menguasai kedudukan adat dan harta pusaka milik bersama, sehingga ia diwakili oleh pamannya, saudara lelaki tertua dan terdekat dari pewaris menurut struktur kekerabatan.⁵⁸

Penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat penerus keturunan tidak berbeda dengan anak kandung, ia bertanggung jawab mengurus dan menyelesaikan hutang-hutang pewaris. Sementara itu sampai pada saatnya harta peninggalan akan dibagi-bagi ia bertanggung jawab menyelesaikan dengan memperhatikan lintiran, welingan dan hibah wasiat pewaris. Demikian pula selanjutnya anak yang

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 236.

menguasainya bertanggung jawab atas gugatan di antara para waris yang menghendaki agar harta peninggalan dibagi-bagi.

e.2.2. Pembagian warisan.

Di lingkungan masyarakat adat yang berlaku di Indonesia, baik dalam susunan masyarakat adat kekerabatan (*geneologis*) ataupun teritorial pada masa sekarang terutama terhadap harta peninggalan yang berupa harta pencarian dan harta bawaan bahkan termasuk di dalamnya harta pusaka dikarenakan hubungan kekerabatan yang melemah tampak kecenderungan untuk melakukan pembagian harta peninggalan oleh para waris. Penyebab dibaginya harta tersebut terjadi apabila orang tua yang masih hidup telah tidak mampu lagi melakukan perbuatan hukum, adanya permintaan dari para waris yang membutuhkan untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarganya dan tidak ada keberatannya dari para waris yang lain. Akan tetapi menurut hukum adat adakalanya timbul persoalan sehubungan dengan hal itu karena ketentuan tentang bagaimana harta warisan akan dibagi, kapan waktu pembagiannya dan bagaimana cara pembagiannya tidak ada ketentuan yang pasti.

Menurut kebiasaan, pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilaksanakan setelah upacara *selamatan*, oleh karena pada waktu itu para waris berkumpul atau menurut kesepakatan waktu oleh para waris dapat berkumpul. Pada saat berkumpulnya para

waris tersebut, maka dibicarakan mengenai hutang piutang pewaris dan cara penyelesaiannya dan juga tentang cara pembagiannya berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku setempat dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup para waris bersangkutan.

Pada umumnya, barang-barang harta peninggalan itu tidak diperhitungkan dengan nilai uang (harganya) melainkan menurut jenis, macam, kedudukan waris dan kebutuhannya. Di samping itu dibicarakan pula tentang lintiran, welingan, hibah wasiat dari harta peninggalan yang sudah diberikan atau dinyatakan oleh pewaris ketika hidupnya. Tidak menutup kemungkinan dalam pembagian warisan itu dapat saja terjadi bagian waris yang hidupnya berkecukupan memberikan bagiannya kepada waris yang kekurangan. Demikian pula antara waris yang satu dan yang lain terjadi pertukaran atau "*nyusuki*" dan sebagainya.

Bentuk pembagian harta yang terjadi di kalangan masyarakat adat Jawa, cara pembagian itu ada dua kemungkinan, yaitu dengan prinsip "*sepikul segendong*" artinya bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan; ataupun dengan cara "*dum dum kupat*" yaitu bagian anak laki-laki dan anak perempuan berimbang sama. Kebanyakan yang berlaku adalah yang dikatakan pembagian berimbang sama (penelitian Soedarso seperti yang dikutip Hilman).⁵⁹

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 116.

Pada sub bab berikut ini akan dikemukakan analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

2. Penerapan Asas Pewarisan Dalam Putusan Hakim

Putusan-putusan pengadilan tentang pewarisan yang hendak dianalisis, dikelompokkan berdasarkan kedudukan ahli waris sebagai berikut :

Kedudukan anak.

1. Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 14/Pdt.G/1998/PN. Kab. Madiun.
2. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 189/Pdt.G/1999/PN. Malang.
3. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 143/Pdt.G/1985/PN. Malang.
4. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 107/Pdt.G/1995/PN. Malang.

Kedudukan anak angkat.

1. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 223/1979/G.
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 311 k/Pdt/1996 tanggal 27 Mei 1998.
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1878 k/Pdt/1992 tanggal 26 Pebruari 1994.

Kedudukan janda.

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1839 k/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998.

Kedudukan janda dari suami yang berpoligami.

1. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 395/PDT/1996/PT.Sby. tanggal 16 September 1996.

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1615 k/Pdt/1993 tanggal 29 April 1995.
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1112 k/Pdt/1990 tanggal 28 April 1993.
4. Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Juli 1991 Nomor 08/Pdt/G/1991/ PN. Kdi.

Kedudukan mamak kepala waris.

1. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/Pdt.G/1998/PT.PDG.
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 956 k/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996.
3. Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 11 Pebruari 1989 Nomor 13/Pdt/G/1987/ PN.Slk.

Penghibahan.

1. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 90/1961.

Seperti sudah diuraikan, bahwa pewarisan menurut hukum adat adalah sebagai proses penerusan dan pengoperan. Dinyatakan sebagai proses penerusan tentunya hal ini berkaitan dengan "*perjodohan*", oleh karena tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Harta warisan itu akan diteruskan kepada anak atau generasi berikutnya.

Berikut ini contoh putusan pengadilan tentang proses penerusan/pewarisan.

2.1. Kedudukan anak.

Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 5 November 1998 Nomor 14/Pdt.G/1998/PN. Kab.Mn.

Tentang duduknya perkara, ada sepasang suami isteri Somolatif telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan Ny. Sudirah yang dalam hal ini

bertindak sebagai penggugat (I). Turut menggugat adalah saudara pewaris dan keponakan pewaris. Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah tanah pekarangan seluas 9 ru atau 126 m² yang terletak di luar wilayah tempat tinggal penggugat I (Ny. Sudirah) dan dikuasai oleh para tergugat bahkan telah diusahakan dibuatkan sertifikat hak milik. Dalam petitumnya dimintakan agar ditetapkannya obyek sengketa sebagai hak dari para penggugat. Setelah dilakukan upaya perdamaian oleh hakim namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara dan berakhir dengan putusan yang isinya memenangkan tergugat.

Analisis terhadap perkara ini adalah bahwa keberadaan keturunan dari pewaris ternyata juga memberi peluang untuk timbulnya persengketaan. Dalam perkara ini muncul pula pihak lain selain anak bertindak sebagai penggugat dan menghendaki pula hak atas obyek sengketa. Oleh karena itu, perlu dijelaskan tentang kedudukan masing-masing para pewaris dalam keluarga dan anggota keluarga lain yang "*kewarisan*".

Keluarga adalah kelompok orang yang ada hubungannya dengan perkawinan. Orang-orang yang termasuk keluarga adalah ibu, bapak dan anak-anaknya.⁶⁰

M.M. Djojodiguno menyebutkan keluarga dengan istilah "*somah*" atau "*brayat*" yang diartikan sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang peragaannya didasarkan atas perjodohan, yaitu perhubungan suami, isteri yang sah, sehingga

⁶⁰ Hasan Shadily, Ensiklopedi Umum, Yayasan Kanisius, 1977, h. 544.

intinya adalah suami-isteri dan idealnya terdiri atas suami isteri serta anak-anak.⁶¹

Sedangkan apabila dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) pasal 1, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud keluarga itu adalah kelompok terkecil di dalam masyarakat yang terbentuknya melalui proses perkawinan yang sah menurut undang-undang yang berlaku dan terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan sebagai isteri. Mencermati perkara tersebut, Ny. Sudirah (penggugat) selaku anak kandung seharusnya sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa karena dialah satu-satunya ahli waris dari P. Somolatif. Sedangkan saudara pewaris ataupun keponakannya yang ikut menggugat tentu saja tidak berhak karena anak kandung pewaris masih hidup. Segala harta keluarga dengan tidak mengindahkan asalnya, baik harta asal suami, harta asal isteri, maupun gono-gini, maka semuanya akan dioperkan kepada anak-anak.

Berkaitan dengan perkara tersebut perlu mendapat perhatian adalah adanya perubahan atau pergeseran konsep tentang timbulnya perkara warisan. Anggapan tradisional, perkara-perkara warisan yang timbul di dalam praktek biasanya disebabkan oleh karena tidak ada anak.⁶² Sedangkan perkara waris seperti contoh perkara tersebut, muncul karena ada anak. Bahkan pihak penggugat dalam perkara itu adalah anak dalam statusnya sebagai anak kandung. Berikut uraian tentang macam-macam status anak.

⁶¹ M.M. Djojodiguno, *Polu-polu Peragaan Masyarakat di Indonesia*, tanpa tahun, h. 17.

⁶² Supomo, *op. cit.*, h. 82.

1. Anak kandung.

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. kedudukan anak kandung sebagai waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Apabila perkawinan ayah ibu si anak sah, maka anaknya sah sebagai waris, sebaliknya apabila perkawinan ayah ibu si anak tidak sah atau anak lahir di luar perkawinan, maka anak menjadi tidak sah sebagai waris dari orang tua kandungnya.⁶³

2. Anak sah.

Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan tidak menurut hukum agama pada dasarnya tidak berhak sebagai ahli waris yang sah dari orang tua kandungnya. Sedangkan anak yang sah, baik anak laki-laki maupun anak perempuan pada dasarnya adalah waris dari orang tua yang melahirkannya.

3. Anak tidak sah

Anak tidak sah, yang sering disebut dengan istilah setempat anak "*haram jadah*", "*anak kowar*" adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama, seperti : anak dari kandungan ibu sebelum

terjadi pernikahan atau tanpa perkawinan sah.⁶⁴

Menurut pasal 43 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, anak-anak tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut undang-undang, anak-anak tidak sah itu dapat menjadi waris dari ibunya atau keluarga ibunya. Hanya saja dalam daerah-daerah tertentu anak tidak sah dapat diperlakukan sama dengan anak sah, seperti di Minahasa asalkan sudah ada tanda pengakuan yang disebut "*mahelilikur*". Ada kalanya anak tidak sah juga dapat mewaris dari ayah atau keluarga ayah atas dasar perikemanusiaan/*welas asih*.

Berdasarkan status anak dan kedudukannya sebagai pewaris, maka seharusnya Penggugat dalam kasus itu harus dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dan berhak atas obyek yang disengketakan. Adapun putusan pengadilan memutus lain adalah karena pembuktian yang diajukan menurut kebenaran formal yang diatur dalam UUPA.

Ketiadaan anak akan menimbulkan sengketa waris atau sebaliknya keberadaan anak ternyata juga timbul sengketa juga tampak pada putusan Pengadilan Negeri No. 189/Pdt.G/1999/PN.Mlg.

Bahwa keluarga H. Marjuki Tamsir mempunyai 3 anak Binroh, Sukur dan H. Muji. Anak ketiga inilah yang menggugat harta orang tua sebagai haknya berupa tanah beran dan tanah pekarangan serta rumah seluas 1.010 m² yang

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980, h. 77.

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 78.

dikuasai oleh keponakan penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah haknya, namun pertimbangan hakim setelah melalui beberapa kali persidangan membuktikan bahwa hal itu tidak benar sehingga dalam putusannya memenangkan pihak penggugat.

Dari proses persidangan atas perkara tersebut tampak bahwa hukum adat yang berasaskan kekeluargaan, dan dalam urusan pewarisan mengedepankan musyawarah dan mewujudkan kerukunan dalam pembagian sudah bergeser ke arah sebaliknya, sehingga terjadi konflik dan mengakibatkan keretakan keluarga. Perkara lain yang semacam kedua putusan terdahulu juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 956 k/PDT/1991, tanggal 30 Oktober 1996, Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1839 k/Pdt/1995, tanggal 4 Juni 1998 dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 143/Pdt.G/1985/PN. Malang.

2.2. Anak angkat.

Selanjutnya akan dianalisis tentang kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

Putusan-putusan yang menyangkut perkara waris oleh anak angkat adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 223/1979/G tertanggal 30-10-1980;
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 311.k/Pdt/1996 tanggal 27 Mei 1998;
3. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1878.k/Pdt/1992, tanggal 26 Pebruari 1994.

Seringkali terjadi dalam suatu rumah tanggal apabila tidak ada keturunan banyak

dijumpai masalah. Menurut Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ditinjau dari pengertian tersebut, maka tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan abadi yang pada hakekatnya untuk memperoleh keturunan yang sah. Namun demikian, tidak semua perkawinan akan memperoleh suatu keturunan sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami isteri. Dengan tidak adanya keturunan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui pengangkatan anak, agar di kemudian hari ada seseorang yang dapat meneruskan garis keturunan mereka.

Pengangkatan anak menurut pemahaman hukum adat dipengaruhi oleh struktur organisasi kemasyarakatan yang sistem keturunannya berbeda. Di daerah-daerah yang hubungan keluarga mengikuti garis kebapakan (patrilineal) pada prinsipnya pengangkatan anak hanya ditujukan kepada anak laki-laki dengan tujuan utama sebagai penerus keturunan. Sedangkan di daerah Minangkabau yang mengikuti garis keibuan (matrilineal), pada prinsipnya tidak dikenal lembaga adat pengangkatan anak. Di Jawa yang sifat kekeluargaannya parental, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Dengan menyimak putusan Pengadilan Negeri Malang No. 223/1979/G disebutkan dalam duduk perkaranya yang pada intinya sebagai berikut :

Almarhum Bok Tuni yang meninggal tahun 1978 tanpa mempunyai anak, pernah "*hidup bersama*" tanpa perkawinan sah dengan Tergugat I, baru pada tahun 1961 mencatatkan perkawinannya dan tahun 1964 cerai, setelah itu B. Tuni tidak pernah menikah lagi sampai meninggal tahun 1978. Pada saat itu menurut dalil yang dikemukakan Tergugat I telah mengangkat anak, yaitu Tergugat II, dan Tergugat III yang ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 712/1978/P. dan No. 713/1978/P, masing-masing tertanggal 17 Januari 1979.

Saudara-saudara B. Tuni sebanyak 4 orang dalam hal ini bertindak sebagai *penggugat* mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah yang dikuasai oleh para tergugat yang sebagian telah dialihkan haknya, ada yang dijual dan ada yang disewakan, adalah harta asal dari saudaranya yaitu B. Tuni, sehingga para tergugat seharusnya tidak berhak atas harta tersebut. Dari beberapa kali sidang yang dilakukan dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pengadilan Negeri Malang telah memenangkan pihak *penggugat*.

Berdasarkan uraian atau posisi kasus tersebut, maka ada hal-hal yang perlu dicermati, yaitu dasar penetapan anak angkat, kedudukan anak angkat dalam hukum waris dan jenis atau macam harta warisannya.

Menurut yurisprudensi dalam hukum adat, seseorang baru dapat dinyatakan sebagai anak angkat bilamana ia telah dibesarkan, disekolahkan, dikhitankan, bertempat tinggal bersama, dikawinkan dan diberi hibah. Hal ini

seperti yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Oktober 1968 No. 91/1968/Sipil jo Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Mei 1970 No. 215/1969/Perd/PTB, juga putusan dari Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Maret 1971 No. 60 k/Sip/1970.⁶⁵ Dari tindakan-tindakan dan langkah itu menunjukkan ada kesungguhan secara lahir batin.

Dewasa ini prinsip pengangkatan anak ditujukan untuk kesejahteraan anak, seperti yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan : "Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak". Yurisprudensi lain adalah putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Oktober 1970 No. 174/1970/Pdt yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 29 Mei 1971 No. 160 k/Sip/1971 yaitu : "Pemeliharaan anak sampai menjadi dewasa serta telah pula mengawinkan anak itu tidaklah otomatis anak tersebut menjadi anak angkat, akan tetapi status anak tersebut hanyalah sebagai anak yang diangkat (*ngenger*) atau anak piara saja". Putusan ini sejalan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 1969 No. 11/1969/Pdt yang menetapkan "Dengan tidak dipenuhinya satu syarat pun untuk pengangkatan anak, membuktikan bahwa anak tersebut bukan anak angkat, melainkan anak piara". Ketetapan lain seperti di dalam putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 24 Maret 1970 No. 55/1969/Pdt; Pengadilan Tinggi Surabaya

⁶⁵ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak/Adopsi di Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1981, h. 10.

tanggal 23 Pebruari 1971 No. 123/1970 yaitu bahwa seseorang pernah kumpul serumah dengan pewaris sejak kecil, belumlah merupakan bukti yang cukup bahwa telah terjadi pengangkatan anak terhadap almarhum.

Selanjutnya, tindakan pengangkatan anak dalam hukum adat harus memenuhi syarat :

a. perbuatan harus terang;

maksudnya adalah harus disetujui oleh orang tua angkat maupun orang tua kandung dan persetujuan tersebut harus pula diketahui oleh keluarga dari kedua belah pihak serta pengangkatan itu diumumkan pada masyarakat sekitarnya.

b. bersifat kontan.

yaitu dengan keikutsertaan baik orang tua angkat maupun orang tua kandung beserta anggota keluarga yang diwujudkan dengan suatu upacara/serah terima/ pernyataan; harus dengan suatu perbuatan timbal balik.

Pada perkembangan berikutnya, saat sekarang ini perbuatan mengangkat anak harus dengan ketetapan Pengadilan Negeri berdasarkan SEMA R.I. No. 2 Tahun 1979 jo No. 6 Tahun 1983 tentang prosedur Pengangkatan Anak. Akibat hukum dari pengangkatan anak akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi si anak sebagai anggota keluarga. Hak anak angkat untuk dipelihara atau diasuh, dibesarkan, dididik mental dan ketrampilan, dikawinkan serta diberi hibah. Anak angkat juga berhak menikmati harta benda orang tua angkatnya semasa hidupnya dan juga memelihara serta mengelola harta benda orang tua angkat. Sedangkan kewajiban anak angkat adalah memelihara serta menghormati orang tua angkat,

memelihara hubungan baik dengan orang tua angkatnya, merawat orang tua angkatnya apabila sudah tidak mampu atau tidak kuat bekerja serta mengurus orang tua angkatnya apabila sudah meninggal dunia.

Adapun kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Anak angkat mewaris.

Di Jawa, anak angkat itu ibarat "*ngangsu sumur loro*" artinya mendapatkan bagian warisan dari dua sumber, karena ia mendapat warisan dari orang tua angkat dan mendapat juga warisan dari orang tua kandungnya. Hal demikian ini pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Puworejo tanggal 6 Januari 1937, bahwa anak angkat masih mewarisi harta orang tua kandungnya dan kerabatnya. Apabila di dalam pewarisan itu ada anak kandung, maka anak angkat mendapatkan harta warisan yang tidak sebanyak anak kandung. Bahkan apabila orang tua angkat takut anak angkat tidak mendapat bagian yang wajar atau mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandung, maka orang tua angkat dapat memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia meninggal dunia dengan cara penunjukkan atau hibah/wasiat.

Betapun anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi bagian anak kandung, sebagaimana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No. 37 k/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sedangkan terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Pengecualian

terhadap ketentuan itu berlaku apabila harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kamar III Raad van Justitie tanggal 25 Mei 1939 bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

Di Bali, perbuatan mengangkat anak adalah merupakan perbuatan yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya, dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak angkat di Bali menjadi ahli waris dari harta orang tua angkatnya.

b. Anak angkat tidak mewaris.

Di daerah tertentu adakalanya anak angkat itu tidak mewarisi harta orang tua angkatnya. Di Lampung, apabila anak angkat itu tidak ditetapkan sebagai anak "*tegak-tegi*", ia bukan waris dari orang tua angkatnya. Di samping itu juga disebabkan karena bukan anak angkat dari kerabat sendiri atau asal-usul anak tidak jelas keturunannya, misalnya *anak akkenan*, *anak pancingan*, *anak piara*, dan *anak titip*. Terhadap haknya untuk mewarisi harta gono-gini tidak dapat dilakukan pencabutan, kecuali perbuatan anak angkat tersebut :

1. menganiaya orang tua angkat yang masih hidup;
2. mencoba membunuh orang tua angkat;
3. berbuat sesuatu yang mendaikan aib bagi kehormatan atau nama baik orang tua angkat.

Berdasarkan kepustakaan, keputusan *Landraad* Malang tanggal 16 Pebruari

1938, pewarisan kepada anak angkat dapat dicabut kembali jika ia oleh sikap dan perbuatannya dapat memutuskan pertalian rumah tangga dengan orang tua angkat. Anak angkat wajib menghormati dan menolong orang tua angkatnya, apabila ia dalam sikap dan perbuatannya tidak melakukan kewajiban tersebut, maka anak angkat dianggap memutuskan pertaliannya dengan orang tua angkat. Dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut dikaitkan dengan perkara B. Tuni tersebut, memang sudah tepat kalau hakim memutus dengan memenangkan pihak penggugat yang dalam hal ini saudara-saudara almarhum B. Tunilah yang berhak atas harta warisannya. Sedangkan dalil yang dikemukakan Tergugat I telah mengangkat anak yang dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Negeri Malang perlu dicermati adanya kejanggalan, yaitu : Suatu hal yang ganjil bahwa penetapan pengangkatan anak dimintakan setelah tergugat I sudah cerai dari B. Tuni dan B. Tuni sudah meninggal dunia. Menurut dalil-dalil dari penggugat dinyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah harta asal yang berasal dari harta peninggalan orang tua para penggugat dan dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Apabila dalam kenyataannya tergugat II dan tergugat III berada dalam satu rumah dan secara riil telah pula dikawinkan, hal itu seharusnya belum menunjukkan adanya syarat telah terjadinya pengangkatan anak, sehingga kedudukan kedua tergugat tersebut adalah sekedar anak "*pupon*" atau "*anak piara*" saja. Dengan demikian tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan macam apapun juga. Terhadap obyek sengketa yang seharusnya

menjadi hak para penggugat, sedangkan sebagian telah dialihkan haknya, maka seyogyanya kalau dimintakan ganti rugi. Secara prosedural menurut hukum acara perdata tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari pihak ketiga kepada yang berhak tidaklah harus diajukan oleh semua ahli waris (Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1969 No. 439 k/Sip/1968).

Untuk selanjutnya akan dikaji putusan Mahkamah Agung No. 311 k/Pdt/1996 tanggal 27 Mei 1998 yang berisikan tentang wasiat yang dinyatakan batal demi hukum.

Kasus posisi putusan itu sebagai berikut.

Sepasang suami isteri H. Mustofa dan Hj. Fatimah tidak mempunyai keturunan, akan tetapi mempunyai satu anak angkat perempuan bernama Wakini yang dalam hal ini bertindak sebagai penggugat. Pada tahun 1983, ayah angkat (H. Mustofa) meninggal dunia, sementara isterinya Hj. fatimah dalam keadaan sakit. Harta peninggalan H. Mustofa berupa :

- tanah sawah seluas 0,037 ha.
- tanah beran seluas 2 petak.
- tanah pekarangan seluas 326 m².
- rumah yang masih ditempati seluas 250 m².

Sementara itu, Wakini (penggugat) sudah berumah tangga sendiri dan tidak serumah lagi dengan ibunya. Oleh karena itu penggugat tidak dapat mengurus ibunya dengan baik, sedangkan kesehatan Hj. Fatimah sakit keras, tetangganya (Nuryasin) dalam hal ini bertindak sebagai tergugat membawa Hj. Fatimah tinggal

di rumahnya dan diurus/dirawatnya. Kiranya hal ini membuat penggugat tidak berkenan, apalagi setelah mengetahui kalau tergugat membuat "surat pernyataan hak milik dengan sepenuhnya" seijin Hj. Fatimah. Inti dari surat pernyataan tersebut adalah pernyataan kepada Yasin untuk mewaqafkan harta peninggalannya kepada lembaga agama.

Setelah melalui beberapa kali sidang, maka di tingkat Pengadilan Negeri, gugatan penggugat dikabulkan sebagian, di tingkat banding, dinyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri, sedangkan pada tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan dalam mengadili sendiri menyatakan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. menyatakan wasiat yang dibuat batal demi hukum.

Berkaitan dengan perkara Wakini ini, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

Ketiadaan anak kandung menimbulkan permasalahan yang beragam. Dalam kasus tersebut terbukti bahwa orang lain dalam hal ini tergugat membuat *surat pernyataan penyerahan hak milik dengan sepenuhnya* tanpa sepengetahuan penggugat (anak angkat) yang isinya untuk mewaqafkan kepada lembaga agama. Upaya musyawarah antara penggugat dan tergugat tidak pernah tercapai sampai pada akhirnya memohon untuk diselesaikan melalui peradilan formal. Tampak bahwa "*wasiat*" yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini tidak melalui prosedur yang benar, di samping itu terkesan ada titik singgung antara hukum adat dengan hukum Islam dalam pertimbangannya.

Memang dibenarkan bahwa menurut hukum adat, proses peralihan dan pengoperan harta dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia melalui upaya pesan atau wasiat. Hanya saja pada saat pewaris karena sakit sudah parah menyatakan wasiat/pesan itu secara terang artinya diketahui anggota keluarga dan disaksikan pamong desa tentang bagaimana seharusnya harta peninggalannya kelak dibagi dan diselesaikan apabila ia wafat. Pada perkara ini, wasiat dipaksakan dengan dibuatnya surat pernyataan penyerahan kepada pihak lain (tergugat) yang tidak ada hubungan keluarga dan bukan ahli waris, apalagi tanpa sepengetahuan anak angkat. Disebutkan harta yang ingin diwaqafkan sesuai wasiat melalui tergugat tersebut adalah seluruh harta, sedangkan yang diperbolehkan untuk diwasiatkan hanya 1/3 bagian saja, wasiat terhadap seluruh harta benda diperbolehkan jika ada persetujuan semua ahli waris. Dengan demikian harta yang seharusnya menjadi hak waris anak angkat ikut dialihkan haknya. Keadaan pada masa sekarang seharusnya segala bentuk peralihan hak atas tanah dilakukan secara formal mengikuti peraturan yang berlaku, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh tergugat.

Menyangkut harta peninggalan orang tua angkat yang cukup banyak tersebut, seharusnya dalam proses persidangan dapat membuktikan adanya jenis-jenis barang apakah harta asal ataukah gono-gini sehingga dapat dengan jelas pembagiannya antara anak angkat dan ahli waris lain seandainya ada, mengingat dalam kasus tersebut juga ada anggota keluarga lain yaitu anak tiri dari ibu angkat penggugat.

Seperti diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pengangkatan anak menurut Islam tidak memberikan status kepada anak angkat sebagai anak kandung orang tua angkat, dengan lain kata hukum Islam mengakui dan membenarkan pengangkatan anak. Akan tetapi pengangkatan itu tidak mengubah status perdata serta hubungan biologis anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya. Anak masih *dinasabkan* kepada orang tua kandungnya.

Hak dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris tetap melekat pada harta peninggalan orang tua kandung, sebab hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat bukan hubungan *sulbi*. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Oleh karena maksud pengangkatan anak lebih mengarah kepada solidaritas sosial/fungsi sosial daripada permasalahan yuridis, maka untuk menjamin agar kehidupannya tidak terlantar setelah orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat diberi sesuatu dari harta peninggalan orang tua angkat untuk bekal hidupnya yaitu dengan jalan hibah maupun wasiat.

Mengingat dalam hukum Islam tidak ada hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka hubungan kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat dikukuhkan dengan perantaraan wasiat *wajibah*. Pengaturan wasiat *wajibah* tercantum dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Ayat (1) : Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

Ayat (2) : Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat *wajibah* adalah wasiat yang bersifat wajib (untuk didahulukan) yang diberikan kepada anak angkat mengingat pertimbangan bahwa hukum Islam tidak mengenal anak angkat, maka otomatis tidak ada kewarisan bagi anak angkat. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batas paling banyak adalah $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan pewaris. Dasarnya adalah hadits Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Woqqas ra, yang artinya :

"Rasulullah s.a.w. datang mengunjungi saya pada tahun *hajji wada'* di waktu saya menderita sakit keras. Lalu saya bertanya : "Hai Rasulullah saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat tuan. Saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak saya perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal) ?" Jawab Rasulullah : "jangan", jawab Rasulullah. Separoh yang Rasulullah ? Sambungku. "Jangan", jawab Rasulullah. Lalu sepertiga ?, sambungku lagi, Rasulullah menjawab : "Sepertiga". Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak". (Riwayat Bukhari Muslim).

Dari gambaran tentang kedudukan anak angkat terhadap penerimaan harta dari orang tua angkat menurut hukum Islam tersebut dapat dianalogikan dalam

putusan Mahkamah Agung bahwa wasiat hanya diperkenankan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan. Dengan demikian jelas bahwa wasiat yang telah dibuat oleh tergugat harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah ada sejak semula dan harta peninggalan H. Mustofa dan Hj. Fatimah kembali diserahkan kepada yang berhak menerima.

Putusan Mahkamah Agung No. 1878 k/Pdt/1992 tanggal 26 Pebruari 1994.

Kasus posisinya sebagai berikut :

Keluarga pasangan Aldasik dan Alsih semasa hidup tidak dikarunia anak. Kemudian mengangkat anak seorang laki-laki (Udi) dan seorang perempuan (Esih), yang sesungguhnya masih keponakannya sendiri. Dari Udi anak angkat laki-laki mendapatkan 5 orang cucu dan dari Esih, anak angkat perempuan memperoleh 4 orang cucu. Setelah Aldasik meninggal tahun 1956 dan Alsih, isterinya meninggal dunia 6 tahun kemudian, harta peninggalannya dikuasai oleh anak angkat laki-laki. Persoalan muncul setelah Udi anak angkat laki-lakinya meninggal dunia, harta yang kemudian dikuasai oleh anak-anak Udi digugat oleh anak-anak dari anak angkat perempuan (Esih) dengan dalil bahwa ia sebagai cucu angkat juga berhak atas harta tersebut. Harta peninggalan Aldasik yang menjadi obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 4.290 tumbak.

Setelah upaya damai yang dilakukan tidak tercapai, maka cara persidangan dilanjutkan dan pada akhirnya pada tingkat Pengadilan Negeri diputuskan, memenangkan penggugat, karena tidak puas, tergugat melalui upaya banding dan diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No.

320/Pdt/1991/PT.Bdg., tanggal 10 Maret 1992 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Bale Bandung No. 27/Pdt/1991/PN.BB, tanggal 1 Agustus 1991. Untuk selanjutnya melalui kasasi dengan isi putusan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan sebelumnya menurut penulis adalah langkah yang betul, karena secara prosedural tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu bahwa dalam dasar pertimbangan dan amar putusan saling bertentangan, padahal di dalam doktrin hukum acara telah ditegaskan bahwa antara pertimbangan hukum dengan amar putusan adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisah.

Dengan demikian, maka putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa baik orang tua penggugat dan orang tua tergugat, keduanya adalah berstatus sebagai anak angkat sehingga semua berhak atas harta peninggalan almarhum Aldasik yang sekarang dikuasai oleh anak-anak dari Tergugat. Berdasarkan putusan yang demikian ini, maka masing-masing pihak berhak atas separo dari jumlah harta peninggalan pewaris sebatas pada harta gono-gini. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1958 yaitu keputusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958 No. 82 k/Sip/1957 yang isinya adalah bahwa anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewaris barang-barang pusaka, sebab barang-barang ini harus kembali pada ahli waris keturunan sedarah. Keputusan ini ditujukan kepada hukum adat yang berlaku di Jawa Barat.

Adapun hal-hal yang mendasari ditetapkannya para pihak dalam perkara

ini sebagai anak angkat adalah sebagai berikut : bahwa apabila dilihat dari latar belakang sebab terjadinya pengangkatan anak itu pada umumnya karena alasan-alasan tertentu, yaitu :

- a. untuk meneruskan keturunan, karena tiak mempunyai anak sendiri sehingga kelangsungan hidup dari suatu keluarga dapat berlangsung terus;
- b. adanya kepercayaan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak, maka diharapkan akan dapat memperoleh anak sendiri (Jawa : sebagai "*pancingan*");
- c. mempererat hubungan kekeluargaan;
- e. hubungan baik dan tali persaudaraan; dan
- f. untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja atau dengan maksud anak yang diangkat tersebut mendapatkan pendidikan yang layak.

Berdasarkan beberapa motif pengangkatan anak ini, maka pasangan Aldasik dan Alsih yang tidak diberi keturunan itu bermaksud mengangkat anak yang salah satu anak angkatnya (perempuan) masih berkedudukan pula sebagai keponakan karena diambilkan dari anak dari saudara kandungnya. Perbedaan asal usul anak dari lingkup kerabat sendiri atau dari orang lain bukan alasan untuk membedakan statusnya sebagai anak angkat dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal yang memperkuat pernyataan ini adalah pendapat dari Wirjono Prodjodikoro tentang anak angkat sebagai berikut "anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami isteri, yang diambil-dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri". Dari pendapat tersebut, maka yang dimaksud sebagai anak angkat adalah :

1. Anak orang lain, yang sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya;
2. Anak yang diangkat masih ada hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya.⁶⁶

2.3. Kedudukan janda.

Pembahasan berikutnya adalah yang berhubungan dengan kedudukan janda dalam hukum waris adat. Putusan-putusan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1839 k/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 395/PDT/1996/PT.Sby. tanggal 16 September 1996.
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1615 k/Pdt/1993 tanggal 29 April 1995.
4. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1112 k/Pdt/1990 tanggal 28 April 1993.
5. Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Juli 1991 No. 08/Pdt/G/1991/PN.Kdi.

Putusan-putusan tersebut terbagi atas dua macam, yakni putusan angka 1 tentang hak mewaris janda bersama-sama saudara kandung dan putusan angka 2 sampai dengan 5 tentang hak mewaris janda dari harta warisan suami yang berpoligami atau keluarga beragam.

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, h. 37.

- a. Kasus posisi putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1839 k/Pdt/1995 tanggal 4 juni 1998 adalah sebagai berikut :

Keluarga dari Hamad Suwardi dengan Ny. Wanti mempunyai anak kandung : 1. Ny. Setijah, 2. Ny. Kaidah, 3. Nurya Suwardi (laki-laki), 4. Ny. Taswih, 5. Ny. Dawisah dan Ny. Darti. Hamad Suwardi telah meninggal dunia tahun 1963 dengan meninggalkan sejumlah harta waris yang telah dibagi waris pada semua anak. Anak laki-laki almarhum yaitu Nurya Suwardi menikah dengan seorang wanita Ny. Nati, akan tetapi tidak mempunyai keturunan. Dalam perkawinannya diketahui Nurya Suwardi membawa harta asal berupa tiga bidang tanah persil No. 105, No. 12 DII dan No. 200 (tanpa disebutkan luasnya). Demikian pula Ny. Nati juga membawa harta asal dua bidang tanah sawah persil 1113 DIV dan C No. 1321. di samping itu mereka berdua membangun dan memperbaiki dua rumah di tanah tersebut dengan biaya dari uang hasil penjualan tanah Ny. Nati. Kedua rumah ini didiami oleh suami isteri Nurya Suwardi dan Ny. Nati.

Persoalan muncul ketika Nurya Suwardi meninggal dunia sedangkan Ny. Nati tidak pernah kawin lagi, pada tahun 1988. Pada Tahun 1991, saudara kandung almarhum Nurya Suwardi yaitu, Ny. Kaidah Cs. mengambil, menduduki dan menguasai semua tanah milik almarhum Nurya dengan alasan karena janda Ny. Nati tidak mempunyai keturunan maka harta harta asal tersebut harus kembali kepada saudara-saudara kandungnya. Dalam perkara ini pihak penggugat adalah Nati isteri almarhum (janda Nurya Suwardi), terpaksa

menggugat saudara-saudara suaminya karena secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan. Setelah melalui beberapa kali persidangan maka telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri di Cilacap No. 11/Pdt.6/1994/PNCLP/tanggal 11 Agustus 1994 yang isinya pada intinya memenangkan pihak penggugat dengan pertimbangan bahwa dengan mengacu pada yurisprudensi, seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya. Disamping itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3190 k/Pdt/1985 tgl. 13 Maret 1987 ditentukan bahwa janda adalah ahli waris suaminya dan kedudukannya sejajar dengan ahli waris anak, sehingga janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan anak, maka janda menutup kewarisan saudara kandung dari almarhum suaminya. Berdasarkan putusan PN. Cilacap tersebut, maka saudara kandung almarhum (Tergugat) mengajukan banding ke PT dan putusannya berisi mengabulkan gugatan tergugat. Pertimbangannya karena perkawinan almarhum Nurya tidak mempunyai anak, maka harta asal kembali kepada asalnya (saudara-saudara almarhum Nurya Suwardi) sedangkan harta gono gini terbagi dua. Pada pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan mengadili sendiri yang menyatakan : penggugat (janda almarhum Nurya) mewarisi harta peninggalan pewaris (harta asal) bersama-sama dengan saudara kandung pewaris. Baik janda maupun saudara pewaris berkedudukan sebagai ahli waris dan berhak memperoleh bagian sama atas harta asal pewaris. Untuk menganalisa putusan ini maka yang harus diperhatikan adalah ketiadaan

keturunan dari pewaris dan macamnya harta yang ditinggalkan.

Di dalam keluarga atau rumah tangga, apabila suami telah meninggal dunia dan anak-anak telah *mentas* semua maka isteri sebagai janda tinggal sendiri berhak untuk memegang harta benda yang ditinggalkannya apabila ia memerlukan dan selama ia memerlukan untuk kehidupannya. Dahulu sebelum Indonesia merdeka, Kamar ke III dari Raad Justisi Jakarta memutuskan pada tanggal 26 Mei 1939 bahwa janda bukan sebagai waris almarhum suaminya, karena dianggap sebagai orang luar dari keluarga suaminya. Akan tetapi dalam kenyataan bahwa ia adalah isteri dan ibu dalam rumah tangga suaminya serta turut membinanya, oleh karena itu ikut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Dengan demikian hak-hak janda dalam pewarisan adalah sebagai berikut :

- a. Janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya, baik dari hasil barang gono-gini maupun dari hasil barang asal suami;
- b. Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya, untuk menarik penghasilan dari barang itu, terlebih lagi apabila mempunyai anak, harta tersebut tetap merupakan kesatuan di bawah asuhan yang tidak dibagi-bagi;
- c. Janda berhak menahan barang asal suaminya, apabila serta selama barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya, untuk keperluan nafkahnya;
- d. Janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak didalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda kawin

lagi, anak minta sebagian untuk modal berusaha dan sebagainya.⁶⁷

Dengan memperhatikan hak-hak janda tersebut, maka kedudukan janda adalah kuat walaupun bukan ahli waris, janda terjamin oleh hak-hak tersebut. Logika tentang kedudukan janda dalam hal penguasaan harta tersebut merupakan langkah maju. Karena dengan logika demikian ini, hukum adat telah memberikan suasana aman bagi janda yang ditinggal mati suaminya, sehingga meskipun janda bukan berkedudukan sebagai ahli waris, namun ia dilindungi hak-haknya, terutama dalam rangka mendapat nafkah bagi kelangsungan hidupnya. Adakalanya terjadi apabila masih ada janda, maka harta warisan itu belum dibagi, namun ketentuan ini bukanlah norma yang mengikat, sehingga pelaksanaannya tergantung kepada kesepakatan para ahli waris.

Pada perkembangan berikutnya mengingat hubungan antara satu sama lain bertambah lama bertambah erat dengan mengingat peranan serta aktivitas ibu dalam rumah tangga, maka sekitar tahun enam puluhan diambil langkah baru dan berani yang menetapkan janda adalah ahli waris dari suaminya. Hal ini tertuang dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 110 k/Sip/1960. Namun harus diperhatikan pula bahwa ada dua syarat untuk janda guna mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris, yaitu :

1. janda harus telah lama hidup bersama dan mengikuti suka duka dalam keluarga;
2. janda, sesudah suami meninggal dunia tidak menunjukkan sikap atau

⁶⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 55.

cenderung memutuskan hubungan dengan keluarga suami atau tidak kawin lagi atau tidak menelantarkan anak-anaknya.⁶⁸

Persoalan warisan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Ny. Nati janda almarhum Nurya tersebut adalah berkaitan dengan harta asal almarhum dan oleh karena tidak ada keturunan dari almarhum dan Ny. Nati. Seperti diketahui bahwa harta benda keluarga adalah terdiri dari barang asal suami, barang asal isteri dan barang gono-gini. Kedudukan janda sebagai ahli waris suaminya, namun barang asal suaminya menjadikan persengketaan waris muncul ke permukaan. Sesungguhnya perbedaan macam-macam barang dalam keluarga tidak akan berarti apabila dalam keluarga itu ada anak-anak. Apabila ada anak, segala harta benda kelak di kemudian hari akan dioperkan kepada anak, sedangkan anak itu wajib memelihara ibunya dengan sebaik-baiknya.

Uraian berikut ini alternatif pembagian harta peninggalan untuk janda dan anak-anak yang sudah dewasa.

1. harta peninggalan (barang asal suami, barang asal isteri dan gono-gini) dibagi-bagi antara semua anak-anaknya. Janda berdiam pada salah satu anaknya dan dicukupi kebutuhan serta riwayatnya. Janda tidak mendapat bagian sedikitpun dari harta peninggalan tersebut walaupun dari barang asalnya sendiri dan juga tidak menuntut untuk mendapat bagian, oleh karena kehidupannya telah terjamin;
2. adakalanya janda mendapat sebagian dari harta peninggalan misalnya sebuah

⁶⁸ *Ibid.*, h. 56.

rumah dan sebidang sawah atau harta yang diberikan kepada janda itu termasuk golongan jenis barang asal suami, sedangkan barang-barang lainnya dibagi-bagi antara anak-anak;

3. bentuk pembagian lain bagi janda, bahwa suami telah mewariskan sebidang sawah yang masuk jenis barang asal suami, dan sebuah rumah yang termasuk harta gono-gini kepada isteri, sehingga setelah suami itu meninggal sisa dari harta peninggalannya dibagi-bagikan antara anak-anak.

Dalam keragaman pembagian harta peninggalan suami itu tidaklah menimbulkan persoalan untuk membagi barang asal dan gono-gini kepada isteri, karena ada anak. Di samping itu dengan adanya alternatif pembagian itu, maka wujud hukum adat telah tercapai, oleh karena janda telah terpelihara kehidupannya.

Kedudukan janda sebagai ahli waris harta asal suaminya akan menimbulkan permasalahan apabila tidak ada anak seperti halnya dalam kasus Ny. Nati tersebut.

Dengan berprinsip pada ketentuan bahwa janda berhak atas *nafkah seterusnya*, berhubung dengan kedudukannya di dalam keluarga, maka untuk keperluan nafkah itu terutama barang-barang gono-gini harus disediakan padanya. Apabila barang gono-gini telah mencukupi untuk keperluan nafkah tersebut, maka para waris lain dapat menuntut supaya barang-barang asal dari pewaris diterima kepada mereka. Para waris lain dimaksud adalah orang tua pewaris, saudara-saudara pewaris atau anak-anak dari lain ibu jika telah pernah

kawin dan ada anak. Apabila barang gono-gini *tidak* mencukupi untuk menjamin nafkah janda, maka barang asal dari suami yang meninggal dapat dipergunakan untuk keperluan tersebut, sehingga barang asal dapat ditahan pembagiannya apabila betul-betul diperlukan guna nafkahnya. Sedangkan penetapan waktu sebagai batas waktu penggunaan barang asal tersebut adalah berlangsung seumur hidup dengan perkecualian apabila janda tersebut kawin lagi. Dengan perkawinan baru itu, janda melepaskan kedudukannya dalam rumah tangga suami yang telah meninggal dunia dan menjadi anggota rumah tangga baru.

Pengasan pernyataan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Oktober 1960 No. 307 k/Sip/1960 yang menetapkan : barang asal dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya dan para ahli waris dari si peninggal warisan dapat memperoleh warisan itu apabila si janda itu kawin lagi atau meninggal dunia.

Pendapat M. Djojodigono, kedudukan janda terhadap harta benda keluarga adalah sebagai berikut :

1. seorang janda adalah ahli waris dalam almarhum suaminya;
2. seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa meninggalkan anak, tidak berhak atas barang asal dari almarhum suaminya;
3. terhadap harta gono-gini, janda berhak mewarisnya.⁶⁹

⁶⁹ M. Djojodigono seperti dikutip Amir Mertosedono, *Hukum Waris*, Dahara Prize, 1989, h. 85.

Berdasarkan pendapat Djojodigono tersebut, jelas bahwa janda tidak berhak atas barang asal suaminya. Namun demikian, menurut beberapa uraian tentang kedudukan janda terhadap harta benda keluarga sangat beragam dan pada umumnya janda dapat menikmati atas penghasilan barang asal untuk keperluan nafkahnya. Hal ini pernah diputuskan Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Noveber 1960 No. 302 k/Sip/1960. Yaitu janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal dari suaminya dalam arti bahwa sekurang-kurangnya barang asal itu tetap pada janda untuk keperluan hidupnya sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi. Oleh karena itu putusan Mahkamah Agung atas perkara waris Ny. Nati tersebut dapat disimpulkan telah banyak terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan dan kepentingan serta rasa keadilan masyarakat dengan mengadakan pembagian yang sama antara janda pewaris dengan para waris lainnya dalam hal ini saudara-saudara kandung pewaris.

- b. Contoh kasus warisan dari keluarga beragam seperti dalam putusan Pengadilan Tinggi No. 395/Pdt/1996/PT yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa B. Aspiatun pihak penggugat/terbanding adalah anak dari B. Sariati dan P. Aspan. Menurut riwayatnya, B. Sariati pernah menikah dengan seorang laki-laki lain selain P. Aspan dan mempunyai satu orang anak (Saleh). Sedangkan P. Aspan sendiri pernah menikah dengan seorang perempuan lain yang dikaruniai 2 orang anak, yaitu Takim (laki-laki) dan Tasmin (laki-laki) yang keduanya sudah meninggal. Dari P. Takim, P. Aspan mempunyai cucu-

cucu, Mariyanah (perempuan) yang dalam hal ini bertindak sebagai tergugat/pembanding, Asma dan Sulipah. Obyek yang disengketakan adalah tanah seluas 90 m² yang diakui sebagai milik penggugat/terbanding, namun dikuasai oleh tergugat/pembanding. Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta asal B. Sariati dan tergugat mengelak dengan menyebutkan bahwa obyek sengketa adalah warisan dari ayahnya (P. Takim). Pengadilan Tinggi dalam putusannya membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 107/Pdt.G/1995/PN.Malang, menolak gugatan penggugat/terbanding sehingga penggugat/terbanding berada pada pihak yang dikalahkan. Putusan Mahkamah Agung No. 1615 k/Pdt/1993 adalah kasus pembagian harta warisan suami berpoligami. Kasus posisinya adalah sebagai berikut :

Almarhum Kasdiman adalah suami Tarmijah, dari pernikahan itu mereka memperoleh seorang anak Kusmiyati (perempuan), Kaspiati (perempuan) dan Sutarman (laki-laki). Pada masa perkawinan ini (tahun 1960) Kasdiman membeli 3 bidang tanah. Pada tahun 1972, Kasdiman menikah lagi dengan seorang perempuan Yasmirah tanpa sepengetahuan isteri pertama. Dari perkawinan kedua memperoleh 1 orang anak laki-laki (Kustiawan). P. Kasdiman meninggal dunia pada tahun 1989. Pada saat anak dari isteri kedua sudah 15 tahun, Tarmijah baru mengetahui bila suaminya telah menikah lagi, terbukti dari surat penetapan ahli waris isteri kedua dan anaknya berdasarkan permohonan penetapan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tuban No. 24/Pdt.P/1990/PN.TBN dikabulkan. Berdasarkan fakta tersebut, maka Tarmijah

(isteri I) beserta anak-anaknya menggugat isteri II (Yasmirah) dan anaknya dengan dalih bahwa tergugat bukan ahli waris atas tiga bidang tanah yang telah dibaliknamakan Yasmirah.

Tanah hasil pembeliannya dengan suami pada tahun 1960 yang ternyata sudah dibalik nama atas nama isteri ke II dan anaknya itu adalah sepenuhnya hak milik penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas harta tersebut. Namun dalam persidangan, walaupun baik Pengadilan Negeri Tuban maupun Pengadilan Tinggi Surabaya memenangkan pihak penggugat dengan alasan yuridis tanah sengketa tersebut adalah gono-gini dari perkawinan I, akan tetapi Mahkamah Agung memutuskan lain, yakni menyatakan tanah terperkara penggugat I adalah 1/2 bagian merupakan hak penggugat, sedangkan 1/2 bagian lainnya harus dibagi semua waris Kasdiman yang terdiri dari penggugat I, II, III, IV (isteri pertama dan 3 orang anak) serta Tergugat I dan II (isteri kedua dan 1 orang anak). Sehingga masing-masing mendapat 1/6 bagian.

Di dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 112 k/Pdt/1990 juga seperti halnya dalam kasus Tarmijah lawan Yasmirah yaitu pembagian harta warisan suami kawin berpoligami, bedanya adalah jumlah isteri pada kasus terakhir ini ada 3 orang isteri yang ketiga-tiganya mempunyai anak. Selain itu yang merupakan putusan sejenis seperti dalam putusan Pengadilan Negeri No. 08/Pdt/G/1991/PN.Kdi.

Berdasarkan uraian singkat kasus posisi pada putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka permasalahan waris yang terjadi di

dalam keluarga yang banyak ragamnya bertambah sulit dan rumit pemecahannya. Kunci pokok pemecahannya adalah haruslah dengan tepat dan jelas menetapkan macam dari jenis harta peninggalan pewaris, harta mana yang termasuk barang asal suami, harta mana yang termasuk gono-gini suami dengan isteri pertama dan mana yang termasuk gono-gini dengan isteri kedua dalam perkawinan kedua dan seterusnya. Penting untuk disepakati bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta gono-gini/harta bersama dan hal ini menjadi hak waris dari isteri dan anak-anaknya. Harta gono-gini yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak harus perolehan keduanya, oleh karena walaupun harta tersebut hasil kegiatan suami sendiri (Keputusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 September 1956 No. 511 k/Sip/1956).

Apabila harta keluarga tersebut sudah tertentu jenisnya, maka akan membawa konsekuensi tiap-tiap rumah tangga tidak berhak atas barang gono-gininya rumah tangga lain yaitu tidak berhak atas barang gono-gininya suami dan isteri lainnya.

Pertimbangan lain yang dapat dijadikan pedoman apabila terjadi poligami dan masing-masing isteri membawa anak, sedangkan ibu kandungnya telah meninggal, si anak hidup dalam keluarga yang lain, maka kedudukan anak adalah sebagai anak tiri. Dalam keluarga tersebut hanya berstatus sebagai anggota keluarga yang tidak berstatus sebagai waris dari orang tua tirinya, walaupun di dalam kehidupan sehari-hari ia dapat ikut menikmati kesejahteraan rumah tangga bersama bapak tiri atau pun ibu tiri bersama-sama dengan

saudara-saudara tirinya.

Mahkamah Agung dalam putusannya telah memberikan bagian kepada tergugat asal (isteri kedua dan anaknya) sebesar bagian yang sama dengan para tergugat, oleh karena mempunyai pertimbangan hukum dengan menganalogikan dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Ketentuannya adalah dalam hal perkawinan pecah karena cerai atau salah satu pihak meninggal dunia, harta gono-gini dibagi dua. Oleh karenanya berdasarkan landasan hukum tersebut, maka 1/2 bagian menjadi hak penggugat asal yang secara mutlak jatuh menjadi haknya dan hanya dapat diwarisi oleh anak-anak yang lahir dari isteri I, sedangkan 1/2 bagian lagi berstatus sebagai "*budel warisan*" kepada seluruh ahli waris Kasdiman/pewaris dengan hak pembagian yang sama.

Menurut penulis, penerapan pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 itu ideal apabila perkawinan itu berlangsung secara monogam dan bukan poligami. Dengan demikian sifat hukum adat elastis dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu tumbuh dan berkembang. Oleh karena ternyata hubungan yang nyata menentukan segala sesuatu, bukan sekedar dogmatik hukum, bahkan antara *adat* dan *hukum* selalu ada ketegangan antara hal yang statis dan yang dinamis. Perkembangan inilah mempertegas sikap hakim untuk mencapai sintesa yang harmonis antara sistem hukum dan kenyataan sosial.

2.4. Kedudukan mamak kepala waris.

Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kedudukan mamak kepala waris adalah putusan Pengadilan Tinggi tanggal 30 Juni 1989 No. 36/Pdt.G/1988/PT. PDG. Kasus posisinya sebagai berikut : Asyari Said, adalah saudara laki-laki tertua dalam suku Sumagek, bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, yakni dari kaum Sariman, bersama-sama dengan saudaranya menggugat Syamsidar (perempuan) dan anggota kaum lainnya serta PPAT Kecamatan Kota Singkarak.

Bahwa penggugat-penggugat dan tergugat adalah sekaum, yaitu keturunan dari almarhum ibu/nenek almarhum Sariaman yang mempunyai 4 orang anak, yaitu 1. Syafiah Maliki, Syamsidar (tergugat), 3. Asrah, dan 4. Elisa Tunus. Anak pertama Syafiah Maliki mempunyai 4 anak, yaitu penggugat (mamak kepala waris) Masri Said, 3. Hilmawati Said dan 4. Tarnusi Said. Obyek yang disengketakan adalah tanah pusaka tinggi yang digarap oleh tergugat. Adapaun alasan penggugat menggugat tergugat dengan dalih bahwa tanah yang termasuk pusaka tinggi sebagai obyek sengketa sebagian telah dijual oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat. Jual beli berlangsung di hadapan PPAT kota X kota Singkarak (ikut tergugat) dengan akta jual beli tanggal 9 Nopember 1984 No. 118/PPAT/1984 dan telah pula dimohonkan sertifikat hak milik kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Solok.

Setelah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil maka melalui beberapa kali sidang dengan

saling menyampaikan bukti-bukti yang dianggap cukup, maka Pengadilan Tinggi memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 11 Pebruari 1988 Perdata No. 13/Pdt G/1987/PN.Slk. Adapun pertimbangan hukumnya adalah : bahwa benar penggugat adalah mamak kepala waris dari kaum Sariamman, bahwa obyek sengketa sebagian telah dijual tergugat adalah tanah pusaka tinggi, bahwa peralihan hak dari tanah pusaka tinggi harus dilakukan oleh mamak kepala waris. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Pengadilan Tinggi dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat/pembanding; menyatakan perbuatan jual beli batal demi hukum, dan menyatakan penggugat/pembanding adalah mamak kepala waris dalam kaum para penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding.

Putusan lain yang menyangkut keberadaan mamak kepala waris adalah putusan Mahkamah Agung No. 956 k/Pdt/91 tanggal 30 Oktober 1996. Perkara ini berkaitan dengan masalah hibah dari mamak kepala waris terhadap kemenakannya. Kasus sebagai berikut :

Almarhum Abdul Rahman Gelar Rajo Magek dalam perkawinannya dengan Toti memperoleh 1 orang anak bernama Rangkayo Noerjaja, dan 2 orang cucu yaitu Muhammad Nazir dan Ny. Patimah. Ketiganya suku melayu, bertindak sebagai penggugat. Tergugatnya adalah Rangkayo Salamah, kemenakan dari almarhum Abdul Rahman dan Zainal Arifin menantu Rangkayo Salamah. Obyek yang menjadi sengketa dalam kasus ini adalah tanah dan rumah sebagai harta pencaharian almarhum Abdul Rahman dan Toti. Tanah tersebut oleh paman tergugat (almarhum Abdul Rahman) dihibahkan kepada kemenakannya tahun

1940 atas pengaruh tergugat secara melawan hak, seangkan Toti isteri almarhum Abdul Rahman meninggal tahun 1930. Setelah menerima hibah, tanah tersebut dijual kepada menantunya dan telah dibalik nama atas nama Zainal Arifin. Dengan demikian hak atas tanah itu telah beralih kepada menantu tergugat I. Perlu diketahui bahwa tanah sengketa selalu berada di bawah kekuasaan penggugat selama ibu penggugat (Toti) masih hidup. Dengan demikian, maka penggugat sebagai ahli waris sah merasa dirugikan akibat penghibahan tersebut.

Dari contoh dua kasus tersebut berlatar belakang hukum waris adat Minangkabau dan menyangkut tentang peran *mamak kepala waris*. Analisis terhadap putusan pertama tersebut adalah sebagai berikut :

Seperti telah diketahui bahwa hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang berbeda-beda. Minangkabau termasuk dalam sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, hal mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Sistem pewarisan yang berlaku di dalam sistem matrilineal adalah sistem pewarisan kolektif. Pada sistem pewarisan ini sistem kolektif berlaku atas *tanah pusaka* yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan *mamak kepala waris* di mana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai (*ganggam bauntuik*). Menyikapi putusan Pengadilan Tinggi No. 36/Pdt G/1988/PT.PDG tersebut, maka pendapat yang tepat apabila Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok No. perkara 13/Pdt/G/1987/PN/Slk. karena tidak beralasan yuridis. Namun juga sebagai hal yang tidak berubah (statis) karena masih terikat pada konsep

tradisional. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam kasus ini adalah penetapan mamak kepala waris menurut adat yang berlaku serta hak dan kewajiban dari anggota sekaum terhadap tanah pusaka tinggi beserta kemungkinan terjadinya pergeseran sesuai perkembangan.

Pihak yang berkedudukan sebagai *mamak kepala waris* menurut adat adalah laki-laki tertua dalam satu kaum selama yang bersangkutan tidak keberatan. Dari pernyataan yang demikian adalah tepat kalau Asyari Said/penggugat/pembanding dalam kasus itu bertindak sebagai mamak kepala waris, karena bagi manapun juga antara penggugat dan tergugat masih dalam kaum, yaitu anak dari Sarianan. Akan tetapi dalam perkembangannya telah terjadi perubahan, dilihat dari faktor kewarisan gelar, hal mana saudara laki-laki yang muda yang mampu dan cakap memakai *gelar datuk* dan berfungsi sebagai *mamak kepala waris*. Hal ini berarti faktor kecakapan dan kemampuan serta kecerdasan telah menggeser hak waris utama saudara pria yang sulung dari ibu kepada saudara pria yang muda dari ibu sebagai mamak kepala waris. Selanjutnya tentang peranan mamak kepala waris perlu diperhatikan menyangkut tentang kewenangan mengatur/mengurus harta bersama itu.

Dalam sistem pewarisan kolektif yang dianutnya, harta peninggalan berupa harta pusaka diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta itu. Sedangkan cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan

masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak di bawah bimbingan mamak kepala waris. Intinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota kerabat/kaum harus mendapatkan persetujuan dengan mamak kepala waris. Demikian pula apabila hendak mengalihkan haknya, inipun terbatas hanya boleh digadai (*disando*) dalam keadaan terpaksa dan tidak boleh dijual. Terbukti dalam perkara tersebut tergugat telah melakukan peralihan hak dengan menjual harta sengketa yang terkualifikasi sebagai harta pusaka tinggi tanpa musyawarah dengan mamak kepala waris. Hal ini jelas telah melanggar adat, karena dalam keadaan terpaksa, harta pusaka tinggi dapat digadai dengan alasan telah terjadinya 4 hal menurut hukum adat Minangkabau, yaitu :

1. rumah gadang ketirisan;
2. mayat terbujur di tengah rumah;
3. gadis gedang tak berlaki; dan
4. adat tak berdiri/pembangkit barang terandam.

Tergugat dalam hal ini tidak tatat terhadap syarat yang digariskan adat.

Sifat dinamis hukum adat juga menyangkut fungsi mamak sebagai "*tungganai*" (*kepala rumah gadang*), terhadap harta pusaka kolektif terutama tanah. Apabila terhadap tanah sudah berubah penguasaannya dari hak kolektif menjadi hak individual, maka fungsi dan peranan mamak kepala waris menjadi lemah terhadap pusaka tinggi.

Pada uraian berikut, analisis terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. No.

956 k/PDT/1991 perihal penghibahan yang merugikan ahli waris.

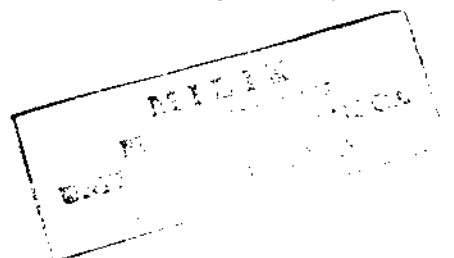
Dalam kasus ini yang menjadi pokok persoalan adalah kedudukan harta pencaharian dalam sistem pewarisan kolektif, terutama menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Apabila dalam keluarga Jawa harta waris harus dibedakan menjadi harta asal dan gono-gini, di Minangkabau karena tidak ada *gezin*, maka harta warisan dalam hukum adatnya terdiri dari harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta suarang dan harta pencaharian.⁷⁰ Dalam perkembangan harta pencaharian adalah harta suarang.⁷¹ Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau mempunyai keunikan dan kekhususan dibandingkan dengan sistem hukum waris di daerah-daerah lain di Indonesia. Hukum waris Minangkabau berkaitan erat pula dengan macam perkawinan semendo yang dalam perkembangannya mengalami pergeseran dari kawin semendo bertandang, kawin semendo menetap dan kawin semendo bebas.

Dalam pandangan tradisional, perkawinan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau adalah "*Exogam Semendo*", sehingga yang menjadi ahli waris apabila suami meninggal dunia adalah : ibu pewaris, saudara perempuan pewaris dan kemenakan perempuan pewaris. Adapun dasar pemikiran demikian ini adalah berawal dari pepatah Minangkabau yaitu pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan.

Terhadap harta pencaharian sebelum tahun 1952, apabila pemiliknya

⁷⁰ Eman Suparman, *op. cit.*, h. 47.

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 45.



meninggal dunia akan jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah, namun setelah tahun 1952 ada kesepakatan antara nenek mamak dan alim ulama agar harta ini diwariskan kepada anaknya.⁷² Menyimak tentang perkembangan ini, jelas bahwa dalam kasus almarhum Abdul Rachman, harta sengketa tersebut harus jatuh kepada anak-anaknya dan bukan kepada kemenakannya (Rangkayo Salamah).

Hak anak untuk mendapatkan status ahli waris dan bagian atas harta pencaharian ini pada masa sekarang tak lain karena hubungan seorang ayah dengan anaknya semakin bertambah erat. Alasan lain berdasarkan penalaran oleh karena suami berkedudukan sebagai "*urang sumando*", maka harta pencaharian terpisah dengan harta pusaka. Sehingga merupakan milik bersama suami dan isteri dan apabila terjadi kematian atau perceraian, maka akan menjadi hak anak-anak.

Menyinggung tentang hibah yang dilakukan almarhum terhadap kemenakan pada kasus tersebut, sebenarnya hal tersebut merupakan pengakuan telah terjadi pergeseran adat, sebab secara tradisional tanpa hibahpun akan mendapatkan warisan dari mamaknya, sebaliknya hibah menurut pemahaman tradisional diberikan kepada anak sendiri sebagai upaya koreksi adat. Oleh karena itu, anak-anak almarhum dalam kasus ini menggugat kemenakan almarhum karena dalam prosesnya telah dilakukan melawan hak dan penghibahan itu telah merugikan ahli waris anak (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Agustus 1960 No. 225 k/Sip/1960) menyatakan : "hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah".

⁷² Eman Suparman, *loc. cit.*

Seandainya pun harta pencaharian harus diwariskan paling banyak sepertiga dari harta pencaharian untuk kemenakan.⁷³

BPHN dalam penelitiannya tentang hukum waris adat Minangkabau menyimpulkan sebagai berikut :

- a. harta pusaka diwariskan kepada kemenakan, sedangkan harta yang diperoleh di luar harta pusaka itu boleh diwariskan kepada anak-anaknya;
- b. harta pencaharian diwariskan kepada anak-anaknya dengan tidak dipersoalkan apakah dibagi dengan sistem faraid atau tidak, yang penting dalam harta pencaharian itu diperuntukkan guna kepentingan anak-anak;
- c. harta pencaharian tidak diharuskan seluruhnya jatuh kepada anak-anaknya, melainkan harus pula jatuh kepada kemenakannya, sebab mamak laki-laki itu dibesarkan, dididik dan dikawinkan oleh kaumnya. Sudah sewajarnya apabila kemenakan juga memperoleh bagian dari harta pencaharian.

Dari hasil peneliti itu dapat dikatakan, bahwa seorang ayah yang sekaligus berkedudukan selaku mamak bagi kemenakannya harus memelihara anak-anaknya dan juga kemenakannya. Dengan demikian, maka apabila dihubungkan dengan kasus tersebut, maka hibah kepada anak diperbolehkan asalkan tidak merugikan kepentingan ahli waris dan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang No. 14/6/B/Q/1985PT.Pdg, tanggal 5 Pebruari 1990 adalah pemikiran modern menuju ke arah pembentukan hukum nasional yang bercorak bilateral.

⁷³ H. Mansur Dt. Nagara Basa, seperti dikutip oleh Eman Suparman, *loc. cit.*

2.5. Hibah terhadap harta asal.

Pengadilan Negeri Lumajang pernah memeriksa, mengadili dan memutus perkara waris menyangkut hibah terhadap harta asal yang jatuh kepada orang yang bukan berkualitas sebagai ahli waris. Putusan atas perkara tersebut tertuang dalam keputusan No. 90/1961 Perdata yang pada intinya sebagai berikut :

Bok Sarni dan Pak Djojodiwirjo tidak mempunyai keturunan dan keduanya telah meninggal dunia. Semasa masih hidup Bok Sarni mempunyai harta yang termasuk harta asal berupa tanah pekarangan dan tanah sawah. Harta tersebut adalah warisan dari orang tuanya yang juga telah meninggal dunia. Harta asal Bok Sarni itulah yang sekarang menjadi obyek sengketa karena para penggugat (saudara-saudara Bok Sarni satu kakek buyut) berdalih bahwa dialah yang seharusnya berhak menguasainya. Sedangkan dalam kenyataannya harta tersebut dikuasai oleh orang lain (para tergugat). Tergugat bersikukuh bahwa obyek sengketa tersebut adalah haknya dengan menyertakan bukti-bukti dengan alasan bahwa empat tahun sebelum meninggal dunia Bok Sarni menghibahkan semua hartanya kepada para tergugat. Atas dasar itulah, penggugat mengajukan gugatan yang di dalam petitumnya disebutkan bahwa penghibahan adalah tidak sah dan harus kembali kepada para penggugat. Isi putusannya memenangkan tergugat, menyatakan bahwa penghibahan itu adalah sah, di samping juga menyatakan penggugat adalah ahli waris.

Pembahasan atas putusan tersebut adalah sebagai berikut : bahwa proses pewarisan yang berlangsung ketika orang tua masih hidup dalam bahasa setempat

adalah "*wewehan*" (pemberian) dengan berbagai motif yang mendasarinya. Istilah hukumnya adalah hibah. Dalam pandangan Islam, hal itu harus dibedakan dengan sadaqoh dan hadiah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hibah adalah untuk menghindari konflik, penghibahan terhadap seluruh harta hendaknya sepengetahuan ahli waris; hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya; hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Tidak ada alasan yang menghalangi pemberian/hibah kepada seseorang yang bukan waris. Pada umumnya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Persoalan dalam kasus itu muncul disebabkan karena :

1. tidak ada anak;
2. menyangkut harta asal; dan
3. orang tua sudah meninggal dunia.

Perihal keabsahan penghibahan harta asal kepada waris selain ahli waris inilah yang perlu untuk diuraikan lebih lanjut. Hukum adat menentukan keberadaan harta asal yaitu apabila ada anak, seluruh harta asal jatuh kepada anaknya. Sebaliknya apabila tidak ada anak, maka harta asal akan kembali kepada asalnya. Janda atau duda tidak berhak menerima bagian harta asal. Dengan

ketentuan seperti inilah yang dijadikan sebagai alasan dalam perkara tersebut sehingga seharusnya harta asal kembali kepada asalnya. Namun pertimbangan hakim lain, sebab orang tua pewaris sudah tidak ada, saudara-saudara kandung tidak ada, tinggal saudara satu kakek buyut.

Pertimbangan hukumnya menyebutkan dengan mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro, bahwa pemilik barang/kekayaan pada waktu masih segar bugar, tidak dalam keadaan sakit keras, menghibahkan secara biasa barang-barangnya kepada siapa saja yang dikehendakinya, artinya barang-barang yang dihibahkan itu seketika itu juga sudah beralih menjadi milik orang yang dihibahi.⁷⁴ Dengan dasar pertimbangan itulah, maka perbuatan hukum yang dilakukan pewaris menghibahkan harta asal itu adalah sah.

Penegasan lain adalah Eman Suparman berpendapat, "pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang".⁷⁵ Lebih lanjut penjelasan tentang hal ini dipertegas lagi dengan yurisprudensi yaitu di dalam keputusan *landraat* Magelang tanggal 3 Agustus 1939 (T. 151 h. 224) yaitu :

Di daerah-daerah di mana terdapat asas kekeluargaan parental, seorang wanita adalah pendukung penuh dari hak-hak dan kewajiban; ia dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dengan tidak perlu dibantu oleh seorang lelaki (bapak atau suami); ia dapat mempunyai harta sebelum kawin, harta mana sesudah ia kawin, disebut *harta asal* atau *gawan*, dengan berkuasa penuh memperlakukannya sebagaimana dikehendakinya.

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, h. 55.

⁷⁵ Eman Suparman, *op. cit.*, h. 76.

Dari beberapa pernyataan itu dengan pertimbangan hakim seperti dalam putusan ini, maka benar bahwa harta asal dapat dihibahkan kepada siapa saja yang dikehendaki sehingga perbuatan hukum itu sah adanya. Hal yang dapat disimpulkan dari perkara yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Lumajang, Mr. Sutomo tersebut menandakan bahwa sekitar pada tahun 60-an, penerapan hukum waris di dalam pengadilan masih bersifat statis.

Dari beberapa putusan yang telah dianalisis tersebut, semua obyek pewarisan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dan rumah. Keadaan demikian ini menunjukkan bahwa yang dipersengketakan itu merupakan benda-benda materiil, dan tidak ada satupun yang bersifat immateriil. Padahal dalam rumusan bagi dari hukum waris adat, obyek waris berupa barang-barang berwujud benda (*materiele goederen*) dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*). Supomo berpandangan bahwa hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia, maka hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁷⁶ Oleh karena itu, dalam kehidupan nyata sekarang ini prinsip-prinsip itu telah bergeser menuju ke arah yang lebih bernilai ekonomis. Hal ini dapat dipahami sebab tanah mempunyai arti segala-galanya bagi manusia, sebagai sumber penghidupan dan kehidupan, dapat

diambil manfaatnya untuk berbagai keperluan dalam memenuhi kebutuhan. Betapa pentingnya arti dan kedudukan tanah bagi manusia ada kalanya menyebabkan diperjuangkan sampai mati ibaratkan "*sedumuk bathuk sanyari bumi, toh pati den labuh*". Sehubungan dengan itu tampaknya masyarakat kita semakin rasional, kecenderungan sifat yang individualistis semakin menonjol. Perubahan terjadi dari masyarakat yang "*gemeinschaft*" mengarah pada masyarakat "*gesellschaft*".

3. Pergeseran Asas Pewarisan

Di dalam kerangka pembangunan nasional, hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum yang hidup (*living law*) merupakan salah satu unsur vitalnya. Pernyataan ini membuktikan bahwa hukum adat diakui urgensinya, sehingga kehadiran dan keberadaan hukum adat di tengah-tengah masyarakat dirasakan dan diperlukan bagi masyarakat kita. Hukum adat mempunyai makna tersendiri, karena ia merupakan refleksi budaya Indonesia dan hidup di dalam sanubari bangsa kita.

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus dan direncanakan untuk kemajuan dan perbaikan yang berorientasi pada tujuan nasional yang hendak dicapai. Perubahan masyarakat Indonesia dari agraris ke industri merupakan perubahan mendasar dan akan menjangkau berbagai dimensi kemasyarakatan baik sosial, budaya, politik dan ekonomi. Terhadap hukum termasuk hukum adat dan perubahan sosial adalah dua hal yang hubungan satu sama lain bersifat

⁷⁶ Supomo, *op. cit.*, h. 82.

paradoksal. Hal ini disebabkan karena dengan atribut yang melekat, hukum menghendaki ketegaran dalam arus perubahan, sementara dinamika sosial membutuhkan penyesuaian pada hukum, dengan dalih agar hukum dapat fungsional.⁷⁷ Dalam rangka perubahan, yang harus mendapat perhatian adalah elaborasi peranan hukum terutama hukum adat agar dapat fungsional di dalam masyarakat.

Corak hukum adat yang mengajarkan dalam bentuk kiasan, bekerja dengan asas-asas pokok dan memberikan kepercayaan yang besar kepada para petugas hukum serta sifatnya yang religio magis, komunal, konkrit dan visual merupakan ekspresi jalan pikiran masyarakat Indonesia. Adapun bentuk hukum adat yang tidak tertulis menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dan berakomodasi dengan perkembangan jaman.

Di dalam hal penegakan hukumnya, peranan dan kontribusi hukum adat, mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk mencari, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pasal 14 (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa, hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", maka hukum adat tepat dan relevan untuk diterapkan karena bentuknya yang tidak tertulis dan sifatnya elastis. Hal demikian itu membuktikan bahwa hukum adat adalah faktor penting dalam penegakan hukum, karena sasarannya adalah

⁷⁷ M. Syamsudin, Endro Kumoro, dkk., *op. cit.* h. vii.

terwujudnya rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Dengan demikian maka hukum adat yang semula dianggap primitif, kolot, konservatif, ketinggalan jaman, statis dan a-rasional dalam banyak hal ternyata mempunyai kelebihan-kelebihan, seperti berikut :

1. sifatnya yang konkrit/riil/empiris itu menjadikan lebih dinamis, plastis, memberikan kemungkinan untuk selalu memperbarui diri, lebih luwes dalam menanggapi tantangan jaman;
2. tidak adanya pembeda dan pemisahan ketat antara hukum publik dan hukum privat dapat membebaskannya dari segala sesuatu yang menghambat gerak langkahnya;
3. fungsi sosial bagi persona maupun benda dapat mendidik warga masyarakat untuk hidup dan berperilaku yang serba proporsional manusiawi;
4. peran hakim dalam pembentukan hukum makin penting, terhadap hukum privat menjadi lebih luwes, supel, kenyal, dinamis, jiwa individualistiknya berkurang, sedangkan sifat dan semangat sosialnya meningkat.

Kolektifitas, masyarakat, kehidupan bersama lebih ditampilkan, kepentingan bersama berdominasi di atas kehendak dan kepentingan perorangan.⁷⁸

Di samping itu Moh. Koesnoe menyatakan bahwa dalam hal modernisasi, dilihat dari segi batinnya antara adat dan kekuatan global terdapat perbedaan yang berlawanan. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

Menurut Filsafat adat dianut :

⁷⁸ M. Syamsudin, Endro Kumoro, dkk., *Ibid.* h. 38.

- a. prinsip kolektivisme;
- b. Universalisme;
- c. idealisme;
- d. manusia yang luhur yang tahu rasa malu dalam mencapai kesejahteraan lahir batin.

Sedangkan menurut filsafat hidup yang dianut kekuatan global sebagai berikut :

- a. prinsip individualisme;
- b. sekularisme;
- c. materialisme;
- d. hedonisme yang menghendaki individu yang selalu bersaing satu terhadap lainnya untuk mendapatkan kemakmuran materiilnya agar dapat menjadi "*Rich and famous*" dan berkuasa.⁷⁹

Lebih lanjut dinyatakan bahwa terhadap kemajuan-kemajuan modernisasi itu, adat dapat menerima dan berusaha mengikutinya. Dengan demikian maka berarti adat memberi konsesi kepada prinsip-prinsip dan filsafat hidup kekuatan global itu. Di dalam memberi konsesi tersebut, masing-masing prinsip adat keadaannya adalah sebagai berikut :

- kebersamaan harus memberi konsesi kepada individualisme;
- prinsip universalisme adat harus memberi konsesi kepada prinsip sekularisme;
- prinsip idealisme adat harus memberi konsesi kepada prinsip materialisme; dan,
- prinsip adat tentang manusia berbudi luhur, tahu rasa malu dan penuh tenggang rasa

⁷⁹ Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi*, Ubhara Press, 1996, h. 137.

harus memberi konsesi kepada prinsip manusia yang berani berkompetensi mengejar keuntungan dan kemakmuran materiil untuk dirinya sendiri tanpa malu.⁸⁰

Mencermati beberapa putusan tersebut, tampak bahwa pewarisan menurut hukum adat telah mengalami beberapa pergeseran, yaitu :

- asas kerukunan dan kekeluargaan yang selalu diutamakan dalam kehidupan masyarakat adat telah luntur dengan lebih suka memperkarakan persoalan waris, menyebabkan hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai tidak dapat dipertahankan lagi. Sifat kebendaan seseorang merubah prinsip dasar pewarisan, oleh karena pada umumnya asas Ketuhanan yang ditarik dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam hukum waris adat merupakan asas dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk mengendalikan diri dalam masalah pewarisan.

Di samping itu kepribadian luhur bangsa Indonesia yang mengutamakan asas musyawarah dan mufakat guna mewujudkan keadilan juga bergeser ke arah sifat individualistis, sebab berdasarkan pola pikir musyawarah pada dasarnya dalam menyelesaikan sengketa warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara yang satu dengan yang lain atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan anggota waris yang lain.

Dari putusan-putusan hakim yang telah dianalisis tersebut juga terdapat beberapa perubahan dalam memandang kedudukan ahli waris dalam pewarisan. Terhadap kedudukan anak, secara umum dapat dinyatakan bahwa keberadaan anak tidak selamanya dapat menjamin ketiadaan perselisihan, bahkan sebaliknya adanya

⁸⁰ Ibid, h. 138.

anak-anak membuka peluang atau kesempatan berperkara warisan semakin luas. Terhadap kedudukan janda, yang semula hanya terbatas mewarisi harta gono-gini saja, ternyata apabila tidak ada keturunan juga berhak atas harta asal suaminya dengan bagian yang sama dengan ahli waris lain. Di samping itu kedudukan janda atau janda-janda dari keluarga yang beragam yang semula hanya berhak atas harta gono-gini keluarganya sendiri menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1615 k/Pdt/1993 telah bergeser, yakni semua anak-anak, baik dari perkawinan I atau selanjutnya mendapat bagian yang sama. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sifat elastis dari hukum adat dapat menyesuaikan diri, oleh karena ternyata hubungan yang nyata menentukan segala sesuatu tidak sekedar dogmatik hukum belaka.

Perkembangan pemikiran ke arah pemikiran modern juga ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 956 k/PDT/1991 tentang penghibahan yang merugikan ahli waris pada pewarisan dengan sistem matrilineal di Minangkabau yaitu bahwa anak-anak berhak atas harta pencaharian ayahnya.

BAB III

PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM

1. Kompetensi Mengadili Perkara Waris

Badan peradilan sudah ada sejak Indonesia merdeka dan secara terus menerus serta bertahap disempurnakan. Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama diatur dengan undang-undang. Semua langkah ini tidak lain untuk menyempurnakan bobot sebagai negara hukum. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pasal 10 ditentukan ada 4 lingkungan peradilan, yaitu :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Militer;
- c. Peradilan Agama, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sengketa antar individu menyebabkan keseimbangan dan ketentraman terganggu sehingga perlu diselesaikan dan butuh lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya. Terhadap lingkungan peradilan dan kompetensinya ada perbedaan antara masing-masing lingkungan peradilan seperti yang dimaksud dalam pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut.

Pembatasan kewenangan itu menurut Philipus M. Hadjon berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh undang-undang, pasal 12 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menetapkan kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur

dengan undang-undang, sedangkan peradilan khusus hanya menangani perkara tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan berpatokan pada prinsip-prinsip tersebut dalam menetapkan kompetensi peradilan adalah :

- a. bahwa lingkup tersebut ditetapkan dengan undang-undang;
- b. bahwa luas lingkup kompetensi peradilan umum ditetapkan dengan menggunakan *residu*, yaitu bidang yang tidak diserahkan kepada peraturan khusus dengan sendirinya termasuk lingkup kompetensi peradilan umum.⁸¹

Berkaitan dengan kewenangan mengadili masalah waris ini bagi masyarakat adat, maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Pendapat ini mendasarkan diri pada ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang menyebutkan bahwa pengadilan agama mempunyai kompetensi perkara waris-mewaris. Di lain pihak, Pengadilan Negeri memiliki kompetensi atas dasar yurisprudensi yang antara lain disebutkan : di seluruh Indonesia Pengadilan Negeri berwenang memutuskan perkara perdata tentang warisan, baik yang mengenai permohonan agar ditetapkan siapa sebagai ahli waris, maupun permohonan agar ditetapkan bagian masing-masing para waris atas harta warisan.⁸²

Yurisprudensi tersebut adalah :

- a. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 24 September 1960 No. 109 K/Sip/1960 di seluruh Indonesia tentang hal warisan pada hakekatnya berlaku hukum adat, yang

⁸¹ Philipus Mandiri Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 116.

⁸² Abdul Moetholib, seperti dikutip Moedjiono, *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Unair No. 2 Tahun XI, Maret - April 1996, h. 47.

dalam pengaruh agama Islam adalah kuat, mengandung sedikit banyak unsur dari hukum Islam;

- b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 Nomor 11 K/A.6/1979; Gugatan warisan yang mengandung sengketa milik tidak termasuk wewenang pengadilan agama, akan tetapi termasuk kewenangan peradilan umum.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Kompetensi Pengadilan lebih jelas lagi yaitu pasal 49 (1) yaitu Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqoh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara formal dan material pemberian kompetensi kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara warisan antara orang-orang yang beragama Islam mendapatkan pengakuan/legitimasi yang kokoh. Di samping itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus yang akan mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Apabila dikaitkan dengan dasar hukum 2 keputusan Mahkamah Agung yang disebut terdahulu, maka pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum Islam hanya dapat berlangsung apabila terjadi kesepakatan dari para waris untuk menggunakan hukum waris Islam. Selanjutnya apabila kemudian ternyata ada pihak yang tidak puas digunakan hukum waris Islam, maka warisan harus dibagi

dengan menggunakan hukum adat dan sekaligus akan menjadi wewenang peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya.⁸³

2. Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim

Dalam alam pikiran tradisional masyarakat Indonesia yang bercorak komunal, yang penting adalah menjaga keseimbangan antara masyarakat dengan warganya serta antara individu dengan individu lainnya sesama warga masyarakat.

Ditinjau dari segi hubungan antara para anggotanya, masyarakat desa di Indonesia bersifat paguyuban yang mengutamakan kerukunan hidup secara lahir batin yang didasarkan pada rasa kekeluargaan serta norma-norma sosial dan adat istiadat yang berlaku. Masyarakat demikian ini adalah perwujudan dari ciri-ciri masyarakat paguyuban, yaitu :

- a. orang satu memandang orang lainnya sebagai tujuan;
- b. tidak ada perhitungan untung rugi satu sama lain;
- c. terdapat rasa kasih sayang dan rindu;
- d. adanya hubungan yang erat.⁸⁴

Akan tetapi, masyarakat Indonesia tidaklah statis, melainkan dinamis, hukum adat menyesuaikan dengan perkembangan, berfikir lebih rasional sehingga semakin besar pamrihnya terhadap dirinya sendiri. Dengan pemahaman ini berarti perhubungan

12. ⁸³ Moedjiono, *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Unair, No. 7 Th. IX Januari - Pebruari 1995, h.

⁸⁴ Djojodiguno, *op. cit.*, h. 233.

pamrih juga dikenal, namun yang lebih penting bagi orang Indonesia asli adalah menilai lebih tinggi perhubungan guyub daripada perhubungan pamrih.⁸⁵ Selanjutnya antara sistem sosial dan sistem hukum mempunyai hubungan yang erat, oleh karena proses hukum berlangsung di dalam suatu masyarakat. Apabila di dalam perhubungan hukum yang sekiranya akan menimbulkan perselisihan, maka usaha pertama kali upaya damai. Masyarakat adat sebenarnya tidak suka berperkara apabila terjadi persengketaan, masyarakat Indonesia asli menghendaki penyelesaian perkara itu dengan damai.⁸⁶

Pada dasarnya tiap penyelesaian sengketa hukum dipengaruhi banyak unsur. Keadaan seperti ini tidak jarang terjadi pula pada penyelesaian sengketa warisan, masyarakat memilih dan menentukan sendiri hukum yang harus diterapkan dan upaya atau cara-cara bagaimana sengketa waris harus diselesaikan. Dengan menerima dan juga membenarkan sekaligus memberikan adanya pengakuan terhadap fenomena baru, baik di dalam proses maupun di dalam penyelesaian sengketa warisan, maka terbukti bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem *dinamisator* yang selalu mengimbangi tiap perubahan dan pembaharuan norma sosial, khususnya norma hukum.

Mengkaji hukum dari segi fungsi dan perannya, maka hukum diadakan bertujuan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat menjadi

⁸⁵ *Ibid.*, h. 232.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 233.

lebih teratur. Oleh karena itu, pada saat terjadinya sengketa, maka hukum adakalanya membuat terobosan bahwa suatu tindakan penting harus dilakukan agar supaya sengketa yang terjadi dapat diselesaikan.

Dalam kaitannya dengan upaya untuk mengakhiri sengketa warisan, ada kecenderungan masyarakat memilih upaya yang diterapkan sebagai sarana penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan baik buruk, untung rugi serta menilai efektifitasnya dari faktor yang berpengaruh dalam pilihan itu. Dengan lain perkataan, perbedaan intensitas, bentuk dan jenis sengketa akan menentukan juga cara penyelesaian yang dapat diterapkan untuk mengakhiri segala hal yang berhubungan dengan sengketa warisan pada masyarakat tertentu.

Upaya atau cara penyelesaian damai dalam sengketa warisan dapat ditempuh dengan cara bermusyawarah baik musyawarah terbatas pada lingkungan anggota keluarga sendiri, musyawarah kerabat dan jika dipandang perlu musyawarah dilakukan di tingkat desa yang disaksikan oleh perangkat desa. Mengenai cara penyelesaian sengketa demikian ini dikenal dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian ini ditempuh dengan cara-cara halus dengan pendekatan lunak, tanpa menonjolkan aturan-aturan hukum, tidak mencari siapa benar dan salah tanpa menyebabkan siapa menang dan kalah. Semua pihak berusaha mencari formulasi "*keadilan*" yang paling dapat diterima dan para pihak berusaha mempertahankan kerukunan dan kedamaian. Nilai-nilai sosial masyarakat di Indonesia cenderung menitikberatkan hubungan manusia secara totalitas dengan penuh tenggang rasa, solidaritas komunal dan kekeluargaan. Masyarakat senantiasa berusaha untuk

melenyapkan konflik atau situasi konflik sekalipun dalam kenyataannya konflik itu sesungguhnya ada.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa kehidupan masyarakat berorientasi pada nilai-nilai kultur yang menghendaki terpeliharanya hubungan sosial yang harmonis. Namun demikian kultur bukanlah faktor satu-satunya yang mempengaruhi pihak yang bersengketa dalam menggunakan atau tidak menggunakan pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Ketidakberhasilan penyelesaian secara damai tersebut memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa secara damai tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh kedua pihak. Dengan demikian bahwa jika cara musyawarah tidak dapat berhasil, pada umumnya barulah para pihak menempuh jalur mencari keadilan melalui pengadilan negeri. Memperjelas uraian ini, berikut tahapan dalam upaya menempuh penyelesaian sengketa waris menurut Hilman Hadikusuma.

- a. diselesaikan di antara para waris bersangkutan sendiri dengan mengadakan pertemuan (musyawarah) keluarga di bawah pimpinan pewaris yang masih hidup atau dipimpin anak tertua (lelaki) atau salah seorang di antara waris yang berwibawa dan bijaksana dari pihak ayah ataupun ibu;
- b. apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para waris, maka pembicaraan ditangguhkan untuk beberapa waktu;
- c. dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak tua-tua kerabat atau keluarga yang berpengaruh sebagai penengah;
- d. apabila juga tidak tercapai kesepakatan dengan rukun dan damai di antara para pihak, barulah perkaranya dengan terpaksa diajukan kepada pengadilan (pengadilan negeri atau agama) untuk diputuskan oleh hakim negara.⁸⁷

Sebagai alternatif terakhir penyelesaian sengketa menurut hukum (oleh pengadilan)

⁸⁷ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 243-244.

karena selain upaya musyawarah tidak tercapai tujuan yang diharapkan, juga karena melalui putusan pengadilan dapat dipakai sebagai kekuatan untuk memaksa pihak lawan untuk memenuhi tuntutan salah satu pihak yang berperkara.

Dilihat dari segi yuridis, penyelesaian sengketa secara perdamaian di luar pengadilan mempunyai kelemahan. Subekti menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian di luar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang bersifat sementara dan tidak tertutup kemungkinan muncul kembali di kemudian hari.⁸⁸ Dengan demikian, maka keberadaan pengadilan selain dibentuk untuk memenuhi kebutuhan struktur kenegaraan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada uraian berikut akan dipaparkan tentang alasan yang menjadi sebab terjadinya sengketa waris dari putusan pengadilan yang ada dan realisasi asas keadilan yang tercermin dalam putusan hakim.

Dari putusan pengadilan yang telah diinventarisir pada bagian sebelumnya tampak bahwa kasus sengketa tanah waris terjadinya dengan adanya tuntutan salah satu pihak karena merasa mempunyai hak waris terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa. Pada hakekatnya sengketa waris yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat disebabkan karena berbagai alasan. Penyebab yang dapat disebutkan dari putusan hakim (putusan pengadilan) tersebut adalah :

1. karena pembagian tidak adil;
2. karena bukan ahli waris; serta
3. adanya monopoli hak mewaris.

Seperti diketahui bahwa pernyataan adil dalam proses pewarisan dipengaruhi oleh alam pikiran dan sendi kehidupan kemasyarakatan adat setempat.⁸⁹

Namun demikian rasa keadilan yang sifatnya bhineka itu terdapat sifat yang umum dapat berlaku, yaitu rasa keadilan berdasarkan asas *parimirma* atau *welas asih* terhadap para anggota keluarga pewaris yang disebabkan karena keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya.⁹⁰

Dengan adanya prinsip keadilan ini, maka adil di dalam hukum waris adat tidak berarti membagi pemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlah atau nilainya, tetapi yang selaras dan sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.

Berikut ini contoh pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan

Putusan No. 189/Pdt.G/1999/PN.Mlg.

Haji Marjuki Tamsir yang meninggal tahun 1967 meninggalkan tiga orang anak, masing-masing (1) Binroh (perempuan), 2. Sukur (laki-laki), 3. Haji Muji (laki-laki), isterinya telah meninggal lebih dahulu (tahun 1927). Harta peninggalan berupa tanah sawah, tanah beran, pekarangan dan rumah, telah dibagi secara adat pada tahun 1957. Berdasarkan musyawarah keluarga, telah disepakati masing-masing ahli waris mendapat bagian sebagai berikut :

1. Binroh mendapatkan :
 1. sebidang tanah sawah;
 2. tanah beran/kering;

⁸⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Jakarta, 1982, h. 58.

⁸⁹ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 30.

- 3 pekarangan dan rumah.
2. Sukur mendapatkan :
 1. tanah sawah;
 2. tanah beran;
 - 3 pekarangan dan rumah.
3. Haji Muji mendapatkan bagian :
 1. tanah beran dan tanah kering;
 - 2 tanah pekarangan dan rumah.

Untuk selanjutnya tanah bagian Haji Muji disebut sebagai obyek sengketa. Haji Muji bertindak sebagai penggugat, menggugat Siti Robiyah (anak Sukur, saudara laki-laki penggugat) karena obyek sengketa dikuasai tergugat tanpa hak. Pengadilan Negeri memutuskan mengabulkan tuntutan penggugat untuk sebagian dan menghukum tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat.

Berdasarkan gambaran pada pokok perkara tersebut ada hal-hal yang perlu dikaji yaitu bahwa pembagian waris tersebut berlangsung sebelum meninggal dunia, cara pembagian dan besar bagian ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Maksud orang tua memberikan harta warisan adalah agar supaya anak/keturunan mempunyai dasar kehidupan materiil. Telah disepakati bahwa bagian masing-masing ahli waris seperti yang tersebut, antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, sedangkan besar bagian yang disepakati tidak dipersoalkan. Karena hal itu dianggap sudah adil, walaupun apabila diperhatikan bagian Haji Muji tidak sama dengan kakak-

⁹⁰ *Ibid.*

kakaknya. Sistem hukum waris adat memandang adil tidaknya berapa bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris tidak berdasarkan perhitungan matematika dan hal ini masih tetap dipertahankan oleh Pengadilan Negeri, terbukti bahwa dalam putusannya disebutkan bahwa hasil pembagian yang telah disepakati para pihak tersebut adalah sah.

Serupa dengan kasus ini adalah seperti yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara No. 143/Pdt.G/1985/PN.Malang, antara Sunhadi sebagai penggugat lawan Masruchin Cs. sebagai tergugat.

Bahwa keluarga Amirjan dan Marjonah, keduanya telah meninggal dunia sekitar tahun 1948 dan 1962, dan meninggalkan harta benda berupa sejumlah rumah, 3 bidang tanah pekarangan. Harta peninggalan tersebut telah dibagi waris secara musyawarah keluarga pada tanggal 5 Desember 1978, ahli waris dari keluarga Amirjan dan Marjonah adalah anak-anak dari kedua anaknya yang telah meninggal, dalam hal ini adalah cucu-cucu sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal yaitu penggugat dan para tergugat. Pembagian warisan dilakukan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa setempat dan telah disepakati bagiannya masing-masing. Persoalan muncul ketika bagian penggugat dikuasai oleh para tergugat. Setelah melalui beberapa kali sidang, akhirnya hakim memutuskan bahwa pembagian yang telah dilakukan secara musyawarah keluarga adalah *sah*, sehingga para tergugat harus menyerahkan kembali bagian penggugat yang telah dikuasai. Dalam perkara ini juga membuktikan bahwa pembagian yang telah disepakati secara musyawarah tetap sah walaupun nilai dari bagian harta peninggalan yang diterima masing-masing ahli waris tidak sama besar.

Putusan lain seperti yang sudah diuraikan tersebut, juga terdapat pada putusan dalam perkara No. 107/Pdt.G/1995/PN.Malang. Ketiga putusan tersebut, mekanisme pewarisannya dilakukan secara musyawarah, namun ternyata tidak mengikat para pihak untuk saling mematuhi dan melaksanakan segala yang telah disepakatinya, sehingga dalam mencari keadilan, pihak yang dirugikan menggunakan lembaga peradilan (secara yudicial) untuk penyelesaian sengketa. Hal ini tentunya telah dipertimbangkan, bahwa cara ini lebih menguntungkan atau bermanfaat dibandingkan secara *extra yudicial* (di luar pengadilan). Penyelesaian melalui pengadilan lebih memberikan kepastian dan ketegasan hukum serta prosesnya yang formal sehingga dapat meniadakan faktor emosional atau sentimen/perasaan. Akan tetapi cara yang ditempuh melalui lembaga peradilan juga mempunyai konsekuensi yang kurang menguntungkan, apalagi pihak-pihak yang terlibat sengketa masih terikat hubungan kekerabatan seperti halnya dalam contoh-contoh putusan tersebut. Penyelesaian dengan menggugat "*kerabat*" sendiri tersebut dapat menyebabkan "*putus*"nya atau retaknya hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin sehingga membutuhkan waktu untuk memperbaikinya lagi.

Di samping itu apabila dikaji dari sudut pandang ekonomi, secara ekonomis hasil yang diperoleh/dikehendaki ada kemungkinan sama sekali tidak menguntungkan, meskipun gugatan dikabulkan. Hal ini disebabkan proses di pengadilan memakan waktu dan kesempatan serta biaya yang relatif cukup besar, apalagi jika menggunakan jasa pengacara.

Sebagai perbandingan untuk melengkapi penjelasan dan uraian ini perlu diuraikan pula kemanfaatan yang diperoleh apabila penyelesaian sengketa waris secara *extra yudicial*.

Penyelesaian sengketa secara informal di luar pengadilan memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk hasil yang lebih memuaskan dan memberikan ketentraman bagi kedua belah pihak yang berperkara. Keutungan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Gibbs, Jr. seperti yang dikutip Soerjono Soekanto sebagai berikut :

1. proses peradilan secara informal segera berlangsung setelah ada pelanggaran. Hal itu mencegah meningkatnya persengketaan antara para pihak;
2. proses peradilan informal terjadi dalam suatu lingkungan sosial yang sama sekali tidak asing bagi para pihak;
3. pada proses peradilan formal, jalannya peradilan berada sepenuhnya di tangan hakim (resmi) hal mana memperkecil kemungkinan bahwa para pihak dapat mengemukakan pernyataan-pernyataan sebebaskan mungkin;
4. dalam peradilan informal, hampir semua yang dikemukakan dianggap penting, sehingga merupakan suatu tempat penyaluran rasa tenggang yang wajar;
5. pada proses peradilan informal, penyelesaiannya bersifat konsensual yang cenderung diterima kedua belah pihak dan bertahan lama.⁹¹

Pertimbangan kemanfaatan yang diperoleh tersebut dapat mempengaruhi

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, h. 94-95.

seseorang untuk memilih menghindari penyelesaian sengketa ke pengadilan. Akan tetapi ternyata banyak pula komponen yang menyebabkan penyelesaian secara informal menjadi lemah. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan lembaga peradilan sebagai institusi yang diharapkan dapat memberikan keadilan. Fakta lain menunjukkan bahwa penggunaan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari pilihan tindakan warga masyarakat dalam realitas kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian tampak pula bahwa kehidupan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kultur yang menghendaki terpeliharanya hubungan sosial yang harmonis yang dahulu kuat sudah bergeser ke arah melemahnya nilai kultur tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup yang merupakan bagian akhir dari penyusunan tesis ini, dikemukakan kesimpulan hasil seluruh kajian tentang proses pewarisan menurut hukum adat dengan segala pergeseran yang terjadi dan tercermin dalam putusan pengadilan.

1. Simpulan

1. Bertolak dari kajian kritis yang telah dilakukan terhadap putusan hakim mengenai perkara waris, maka tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam realitanya telah terjadi perubahan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat adat. Perubahan-perubahan pola yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan berubahnya pola pikiran masyarakat setempat dalam memandang segala sesuatu. Kesanggupan untuk menyesuaikan diri itu disebabkan karena bentuk hukum adat itu tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, maka dengan sifat elastisitasnya yang luas sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Upaya para pihak untuk menyelesaikan sengketa warisan berdasarkan tahapan negosiasi, mediasi, berubah ke arah adjudikasi, hal ini menunjukkan upaya damai yang mempertahankan nilai-nilai kultur demi terpeliharanya hubungan sosial yang harmonis bergeser ke arah realitas yang menunjukkan bahwa putusan pengadilan dapat ditegakkan berdasarkan kekuatan struktur bukan bersandarkan pada kultur.
2. Dalam situasi yang memaksa, ternyata Pengadilan Negeri merupakan pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa waris yang dipandang lebih tepat. Adapun

pemilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebabkan karena sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, pengadilan mempunyai kewenangan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya. Pembagian yang telah dilakukan secara adat pada umumnya mendapatkan penguatan dari pengadilan. Hal ini mencerminkan bahwa asas keadilan dalam putusan hakim mempertahankan prinsip adat yang selalu berdasarkan pertimbangan ukuran "bagian layak" dan tidak berdasarkan perhitungan matematis.

2. Saran

Hukum adat sebagai suatu disiplin ilmu dapat berbuat banyak untuk memperkirakan apa yang terjadi dengan mengumpulkan keajegan-keajegan yang terjadi pada waktu sekarang dan waktu yang lampau. Untuk keperluan ini, maka hukum adat harus memperkuat diri sebagai disiplin ilmu yang lebih canggih, mempunyai tujuan jelas, agar hukum adat sebagai suatu disiplin ilmu tidak akan lenyap ditelan waktu. Berdasarkan hal itulah perlu saran sebagai berikut :

1. Hukum adat perlu mendapatkan pengkajian lebih lanjut, terutama dari segi konsepnya sehingga akan muncul konsep baru tentang "Hukum Adat" yang benar-benar relevan dengan eksistensinya.
2. Nilai-nilai adat yang dipandang masih mempunyai relevansi dengan rasa keadilan dalam pewarisan, maka perlu diakomodasikan ke dalam hukum yang akan diberlakukan untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dijk, van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terjemahan oleh A. Soehardi, Sumur, Bandung, 1979.
- Djojodigono. *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Badar Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 1964.
- _____. *Pola-pola Peragaan Masyarakat di Indonesia*, tanpa tahun.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____. *Hukum Waris adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.
- _____. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Hanityo Sumitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, PT. Gramedia, 1995.
- Koesnoe, M. *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya, Airlangga University Press, 1979.
- _____. *Hukum Adat Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi*, Ubhara Press, 1996.
- Mandiri Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak/Adopsi di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Adat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan M. Arief, Intermasa, Jakarta, 1979.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Penerbitan Vorkink-Van Hoeve, Bandung, tanpa tahun.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Waris Islam*, Wijaya, Jakarta, 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1979.
- _____. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.
- Supomo, R. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1982.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
- _____. *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- _____. *Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional*, 1983.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.
- Syamsudin, M. dkk. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1998.
- Tamakiran. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 1992.
- Taneko, Soleman Biasane. *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981.
- Wignjodipuro, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Varia Peradilan, No. 102, Majalah Hukum, IKAHI.
- _____. No. 110, Majalah Hukum, IKAHI.
- _____. No. 117, Majalah Hukum, IKAHI.
- _____. No. 135, Majalah Hukum, IKAHI.
- _____. No. 156, Majalah Hukum, IKAHI.

_____. No. 166, Majalah Hukum, IKAHI.

_____. No. 177, Majalah Hukum, IKAHI.

Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Unair No. 2, Th. IX, Januari-Pebruari 1995.

_____. Majalah Fakultas Hukum Unair No. 2 Th. XI, Maret-April 1996.

Mahkamah Agung R.I. *Yurisprudensi Indonesia*, Penerbitan Tahun 1997-II.